

Rencana Strategis Program Pascasarjana UNIMA 2016-2020



**UNIVERSITAS NEGERI MANADO
PROGRAM PASCASARJANA
2018**

Kata Pengantar

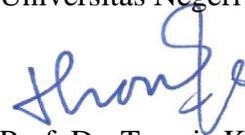
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena revisi Rencana Strategis (Renstra) Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado tahun 2016--2020 ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Rencana Strategi ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Operasional (Renop) Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado dan penyusunan revisi Rencana Strategi Program Studi yang ada di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril, tenaga maupun pikiran sehingga terwujud buku ini. Segala kebaikan mereka kiranya mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Semoga buku Rencana Strategis (Renstra) Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado tahun 2016-2020 yang sederhana ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado ke arah lebih baik.

Tondano, Juni 2018
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Manado,



Prof. Dr. Treesje K. Londa, M.Si
NIP. 196307021987102001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan nasional yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEKDIKTI) dan Universitas Negeri Manado (UNIMA) serta Program Pascasarjana (PPs) haruslah didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 itu, pada Batang Tubuh UUD 1945 diatur pula dasar-dasar konstitusi mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan tinggi.

Dalam UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) digariskan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Selanjutnya dalam UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Di samping itu, Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Kemudian Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Pendidikan Tinggi (PT) hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan

nasional dan daerah dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan IPTEK dan PT mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia (SDM) yang terampil untuk memenuhi kebutuhan dan atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Keberhasilan pembangunan IPTEK dan PT yang telah dicapai pada periode sebelumnya merupakan langkah yang sangat penting bagi keberhasilan yang lebih menyeluruh untuk pencapaian kinerja pada periode 2016-2020.

Kinerja - individual, kelompok, dan organisasional - adalah suatu indikator utama yang dijadikan ukuran keefektifan dan produktivitas organisasi. Untuk menghadirkan organisasi berkinerja yang tinggi tentu saja dibutuhkan dukungan secara serentak dari individu dan kelompok yang berkinerja tinggi. Suatu upaya untuk menghadirkan organisasi yang berkinerja tinggi dibutuhkan manajemen kinerja efektif yang difasilitasi oleh pemimpin yang efektif.

Salah satu karakteristik dari pemimpin yang efektif adalah visioner. Pemimpin yang berkarakter visioner mampu melakukan perubahan-perubahan mendasar ke arah perbaikan dan bahkan mampu melakukan terobosan-terobosan yang bersifat inovatif. Dapat dikatakan bahwa pemimpin yang berkarakter visioner tidak selamanya merasa puas dengan zona nyaman, melainkan senantiasa melakukan tindakan berani dan kreatif untuk keluar dari zona nyaman karena adanya tuntutan dan aspiran yang terus berubah dan tidak pasti, baik yang bersumber dari dalam organisasi (internal) maupun yang bersumber dari luar organisasi (eksternal).

Atas tekanan perubahan-perubahan itu secara otomatis akan mengubah cara pandang ke masa depan dari seorang pemimpin. Itulah sebabnya setiap pemimpin diharuskan merumuskan suatu visi yang ditanamkan ke dalam sistem keorganisasian. Visi yang dirumuskan pemimpin pada level atas dikomunikasikan secara jelas kepada para manajemen yang berada level menengah dan bawah serta kepada para staf. Substansi isi komunikasi itu tercermin dalam bentuk teks misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan sasarannya, kegiatan dan sasarannya, dan sampai ke teks yang berupa target-target kinerja yang dapat diukur melalui indikator kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan.

Ditinjau dari perspektif manajemen kinerja, salah satu fungsi pokok manajemen kinerja yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin dalam setiap organisasi adalah fungsi perencanaan. Dalam konteks Universitas Negeri Manado (UNIMA) sebagai suatu organisasi, Rektor sebagai pemimpin yang berada pada level tertinggi/atas diharuskan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman yang dijadikan suatu landasan dalam mengelola dan memimpin UNIMA. Demikian pula dengan Direktur sebagai pemimpin tertinggi dalam sistem keorganisasi Program Pascasarjana (PPs) di UNIMA diwajibkan merumuskan Renstra sebagai cerminan dari Renstra Rektor UNIMA dan sekaligus sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin PPs.

Dinamika dan perkembangan yang terjadi di lingkungan kelembagaan UNIMA turut berpengaruh terhadap dinamika dan perkembangan kelembagaan PPs. Pengaruh itu bukan hanya berasal dari dalam melainkan pula pengaruh itu dapat berasal dari luar. Semua pengaruh tersebut perlu dicermati dan dikelola secara efisien dan efektif agar memberikan dampak positif dan berarti terhadap peningkatan kinerja kelembagaan PPs UNIMA itu sendiri.

Secara organisatoris, ketika pemimpin UNIMA melakukan revisi terhadap Renstra tahun 2015--2019, maka secara otomatis pemimpin PPs perlu melakukan revisi terhadap Renstra PPs 2015--2019 yang telah ada. Upaya revisi terhadap Renstra PPs tersebut dikandung maksud untuk melakukan penyesuaian agar target-target kinerja yang dirumuskan adalah dalam kerangka menunjang pencapaian target-target kinerja yang disepakati dan ditetapkan dalam Renstra UNIMA yang telah direvisi.

Sebelum dilakukan revisi terhadap Renstra PPs terlebih dahulu dilakukan langkah evaluasi menyeluruh terhadap isi Renstra sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dilakukan langkah revisi dan atau perbaikan sebagai suatu cara untuk menyesuaikan dengan Renstra UNIMA yang telah ada. Hal-hal pokok yang direvisi meliputi rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan target kinerja. Melalui revisi terhadap Renstra tersebut kinerja kelembagaan PPs dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan terjadi perubahan ke arah perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

B. Landasan Filosofis dan Kebijakan

1. Landasan Filosofis

Pada hakikatnya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika memberikan landasan filosofis dan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan PPs di UNIMA. Landasan filosofis tersebut, menempatkan sivitas akademika PPs sebagai manusia Indonesia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala anugerah-Nya dalam menunaikan kehidupan pribadi yang berharkat, bermartabat, menjadi manusia yang bermoral, jujur, berbudi luhur, berakhlak mulia, mempunyai karakter, jati diri bangsa, dan menghargai keragaman budaya.

Penyelenggaraan pendidikan pada PPs di UNIMA merupakan suatu upaya menjadikan sivitas akademika sebagai manusia Indonesia seutuhnya yang tanpa hentinya menjunjung tinggi dan memegang teguh norma dan nilai kenegaraan dan kebangsaan sebagai berikut:

- a. **norma agama dan kemanusiaan** untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;
- b. **norma persatuan bangsa** untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. **norma kerakyatan dan demokrasi** untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. **nilai-nilai keadilan sosial** untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

2. Landasan Kebijakan

Penyusunan revisi Renstra UNIMA 2016-2020 ini didasarkan pada sejumlah kebijakan yang disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan PPs UNIMA ke depan.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
9. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 Tentang Konversi IKIP Manado menjadi Universitas Negeri Manado.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
13. Ketetapan Senat Universitas Negeri Manado Nomor 4924/UN41/PR/2014 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Manado 2015-2019.
14. Ketetapan Senat Universitas Negeri Manado Nomor tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Negeri Manado 2016-2020.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PASCASARJANA

A. Pendidikan, Pengajaran, dan Pembinaan Aktivitas Instruksional

Pengembangan program pendidikan akademik di PPs UNIMA diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu sampai akhir tahun 2015 PPs UNIMA terus dipercayakan menyelenggarakan program-program studi yang telah ada dan terus mendapat kepercayaan untuk membuka program-program studi baru yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Program-program studi kependidikan yang menyelenggarakan program pendidikan akademik pada program magister (jenjang S2) meliputi (1) program studi manajemen pendidikan, (2) program studi bahasa Indonesia, (3) program studi bahasa Inggris, (4) program studi pendidikan guru sekolah dasar, (5) program studi pendidikan IPA, (6) program studi pendidikan IPS, (7) program studi pendidikan matematika, (8) program studi teknologi dan kejuruan, (9) program studi pendidikan olahraga, dan (10) program studi pendidikan ekonomi. Sedangkan program-program studi nonkependidikan yang menyelenggarakan pendidikan akademik meliputi (1) program studi biologi, (2) program studi administrasi negara, dan (3) program studi ilmu kimia. Di samping itu, PPs UNIMA dipercayakan pula menyelenggarakan program studi kependidikan pada program doktor yakni program studi manajemen pendidikan (jenjang S3).

Dalam menyelenggarakan program studi kependidikan dan nonkependidikan tersebut dibutuhkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, sampai akhir tahun 2015 revisi pengembangan kurikulum pada setiap program studi belum disesuaikan dengan kebijakan nasional mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP). Kendatipun demikian bahwa upaya revisi pengembangan kurikulum yang telah dilakukan merupakan suatu langkah maju karena ada niat yang baik untuk menyesuaikan kurikulum setiap program studi dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka implementasi kurikulum melalui proses pembelajaran, PPs UNIMA difasilitasi dengan media pembelajaran seperti LCD dan *promothean*. Hal ini demikian karena PPs UNIMA dalam implementasi Renstra memberi

perhatian terhadap peningkatan mutu proses pembelajaran. Di samping itu, PPs UNIMA secara berkelanjutan pada setiap tahun anggaran disediakan alokasi dana untuk penulisan buku ajar melalui Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) UNIMA. Penyediaan alokasi dana untuk penulisan buku ajar tersebut pada prinsipnya untuk mendukung upaya peningkatan mutu pembelajaran pada setiap program studi.

Meskipun telah ada capaian-capaian target kinerja yang diperoleh, namun diakhir tahun 2015 masih tersisa masalah yang krusial yaitu penyelenggaraan perkuliahan pada program S2 Manajemen Pendidikan dan S2 Administrasi Negara yang diselenggarakan di Kabupaten Nabire. Hal ini memberi catatan penting untuk dijadikan agenda dalam pengembangan program dan kegiatan yang dirinci dalam target kinerja pada taun-tahun berikutnya.

B. Penelitian

Dalam rangka peningkatan produktivitas penelitian, para dosen di PPs UNIMA didorong untuk berkompetisi mendapatkan fasilitasi dari Lembaga Penelitian UNIMA melalui alokasi dana penelitian yang bersumber dari PNBPN. Kebijakan memberikan dorongan untuk berkompetisi dalam bidang penelitian, bukan saja secara internal, melainkan didorong juga untuk berkompetisi merebut hibah penelitian tingkat nasional melalui skema-skema penelitian yang ditawarkan, baik dalam skala sentralisasi (nasional) maupun skala desentralisasi.

Dampak dari kebijakan PPs UNIMA dalam bidang penelitian terjadi peningkatan bagi dosen yang mendapatkan penelitian, baik yang dibiayai melalui sumber dana PNBPN maupun DRPM. Dengan keadaan dosen PPs UNIMA yang berjumlah 114 orang, pada akhir tahun 2015 tercatat ada 78 penelitian yang dikerjakan oleh dosen yang tersebar pada 14 program studi. Keberhasilan para dosen mengerjakan penelitian tersebut telah memungkinkan beberapa dari mereka yang dapat mempublikasikan hasil penelitian melalui jurnal nasional (ISSN), jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional bereputasi/terindeks. Untuk lebih memantapkan jumlah dosen yang memperoleh hibah penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian dalam berbagai jurnal ilmiah, pada periode lima tahun ke depan akan terus ditingkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.

C. Pengabdian pada Masyarakat

Dalam rangka peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat telah diupayakan berbagai program dan kegiatan agar para dosen PPs UNIMA termotivasi melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat. Target kinerja yang diukur dalam bidang ini mengacu pada jumlah layanan dan atau kegiatan yang dilaksanakan. Pada akhir tahun 2015, tercatat 45 dosen yang tersebar pada program-program studi di PPs yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Capaian kinerja ini perlu ditingkatkan pada periode lima tahun ke depan, sehingga tingkat keterlibatan para dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat makin meningkat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan para dosen PPs UNIMA tersebar pada skema program-program kompetitif yang ditawarkan oleh LPM (UNIMA) dan DRPM (pusat). Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, selain bersumber dari alokasi dana melalui PNBPN, juga bersumber dari alokasi dana melalui DRPM.

Skim program pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan melalui DRPM antara lain Iptek bagi Masyarakat (IbM), Iptek bagi Kewirausahaan (IbK), Iptek bagi Produk Ekspor (IbPE), Iptek bagi Produk Unggulan Daerah (IbPUD), Iptek bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbKIK), Iptek bagi Wilayah (IbW), Iptek bagi Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR, Iptek bagi Desa Mitra (IbDM), Program Hi-Link, dan Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Beragam skim kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut merupakan suatu tantangan dan peluang yang perlu direbut dalam proses kompetisi program, sehingga pada periode lima tahun mendatang hal itu akan terus ditingkatkan agar jumlah dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat makin meningkat.

D. Sistem Penjaminan Mutu

Peningkatan mutu PPs UNIMA dilakukan melalui pengembangan kebijakan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Implementasi sistem penjaminan mutu internal, secara struktural berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPPT) UNIMA. Hal ini terlihat dari struktur penjaminan mutu internal dengan adanya Unit Penjaminan

Mutu (UPM) untuk tingkat institusi PPs dan Gugus Mutu (GM) untuk tingkat institusi Program Studi. Kendatipun dalam realitasnya belum dapat dipersepsikan memuaskan, namun kehadirannya merupakan suatu terobosan penting agar proses penjaminan mutu PPs UNIMA dapat ditingkatkan dalam periode lima tahun ke depan.

Upaya koordinasi antara UPM dengan pimpinan PPs dan antara GM dengan pimpinan program studi masih perlu diperkuat dan ditingkatkan. Hal ini penting diagendakan dalam periode lima tahun ke depan, sehingga proses penjaminan mutu internal makin kuat dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu kelembagaan PPs dan program studi. Misalnya, dalam hal monitoring dan evaluasi (monev). Sampai akhir tahun 2015 belum tersedianya format dan instrumen baku yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan monev seperti kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, untuk lebih menguatkan sistem penjaminan mutu internal dalam periode lima tahun ke depan akan dikembangkan kebijakan mutu yang berupa pedoman dan atau panduan serta *Standard Operating Procedures* (SOP).

Implementasi sistem penjaminan mutu eksternal, secara struktural dilakukan oleh BSNPT dalam rangka akreditasi program studi. Pada akhir tahun 2015, program studi yang terakreditasi minimal B berjumlah 3 program studi yakni program studi S2 Manajemen Pendidikan, program studi S2 Bahasa Indonesia, dan program studi S2 Administrasi Negara. Meskipun capaian target kinerja masih jauh dari yang diharapkan, namun pada periode lima tahun ke depan akan terus ditingkatkan, sehingga capaian kinerja dapat memenuhi target dan bahkan bisa melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk mendukung hal itu tentu saja dibutuhkan pengembangan budaya mutu di PPs UNIMA.

E. Kemahasiswaan

Keadaan mahasiswa PPs UNIMA dalam periode tahun 2011--2015 menunjukkan kemajuan yang berarti. Kemajuan yang berarti tersebut ditunjang dengan kebijakan penerimaan mahasiswa baru dengan strategi sosialisasi yang efektif dan kerjasama yang dilakukan PPs UNIMA dengan berbagai kelembagaan. Pada akhir 2015 keadaan mahasiswa PPs UNIMA berjumlah 1628 orang. Jumlah

kelulusan 637 orang, secara kumulatif rata-rata IPK 3,42, dan swecara kumulatif pula rata-rata lama studi 3,25 tahun.

Pembinaan kemahasiswaan di PPs UNIMA dilakukan secara individual dan kelompok. Dalam periode tahun 2011--2015 pernah dibentuk Forum Mahasiswa PPs sebagai wadah pembinaan kemahasiswaan, namun karena karakteristik mahasiswa PPs wadah yang dibentuk ini belum dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Bahkan diakhir tahun 2015 wadah yang dimaksud tidak berfungsi lagi karena kepengurusannya tidak dibentuk lagi.

Dilihat dari pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kreativitas hanya dimensi penalaran yang berkembang seperti keikutsertaan dalam seminar kelas, seminar nasional, dan seminar internasional yang diadakan PPs. Pada periode lima tahun ke depan, sisi penalaran akan terus ditingkatkan sebagai uapay menciptakan ik;lim akademik yang kondusif di lingkungan PPs. Khusus pengembangan minat, bakat, dan kreativitas pada periode lima tahun ke depan akan dilakukan terobosan program agar berbagai potensi keunggulan mahasiswa PPs dapat dikembangkan sampai batas maksimalnya. Termasuk program terobosan yang dapat diadakan lima tahun ke depan antara lain pengembangan potensi seni, budaya, dan kerohanian serta kebangsaan bagi mahasiswa PPs. Untuk itu penguatan kebijakan pembinaan kemahasiswaan akan menjadi perhatian yang lebih dikelola secara efektif lima tahun ke depan karena berbagai tantangan yang menghadang seperti munculnya isu radikalisme dan terorisme di kalangan kampus yang perlu dicegah dan ditanggulangi.

Di samping itu, selama periode tahun 2011--2015 kebijakan PPs yang berkenaan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan bagi pelaku tindak plagiarisme belum dikembangkan. Oleh sebab itu, dalam periode lima tahun ke depan PPs UNIMA bertekad untuk mengembangkan kebijakan yang berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan bagi pelaku tindak plagiarisme.

F. Pengembangan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan Renstra 2011--2015 meliputi pengembangan SDM tenaga pendidik (dosen) dan SDM tenaga kependidikan seperti pustakawan dan staf administrasi. Kebijakan

pengembangan SDM di PPs diarahkan pada motivasi peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, promosi guru besar, kepangkatan, dan karier.

Keadaan dosen tetap tahun 2015 berjumlah 114 orang yang kesemuanya berkualifikasi pendidikan doktor (S3), lektor kepala berjumlah 60 dosen, dan Guru Besar (Profesor) berjumlah 47 orang serta bersertifikat pendidik berjumlah 112 orang. Capaian target kinerja ini akan makin ditingkatkan pada periode lima tahun ke depan. Meskipun ada dosen yang akan purna tugas (pesiun), namun kekurangan itu akan diintervensi dengan kebijakan pengadaan dosen tetap melalui mekanisme pengusulan pengadaan dosen tetap. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan jumlah Guru Besar akan dilakukan strategi motivasi kepada para dosen pada periode lima tahun ke depan agar target kinerja dapat dicapai dan bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Keadaan tenaga kependidikan tahun 2015 memiliki 1 orang bergelar S2 dan 8 orang bergelar S1. Tenaga pustakawan berjumlah 1 orang yang melayani kegiatan perpustakaan PPs. Dalam periode lima tahun ke depan akan ditingkatkan kualifikasi tenaga kependidikan melalui strategi motivasi peningkatan kualitas dan pengadaan untuk melaksanakan layanan di bidang administrasi pada tingkat PPs dan pada tingkat program studi.

G. Penataan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Finansial

Dilihat dari sumber daya finansial, kapasitas sumber dana yang berasal dari penerimaan masyarakat selama implementasi renstra 2011-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun anggaran 2015, dana yang disulkan lima miliar rupiah, namun yang disetujui untuk dikelola PPs tidak lebih dari empat miliar rupiah. Di samping Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP), sumber daya finansial PPs UNIMA bersumber juga dari Rupiah Murni (RM). Secara reguler RM ini tidak langsung dikelola secara otonomi oleh PPs UNIMA. Melalui usulan pengadaan gedung baru sebenarnya telah terpenuhi, namun belum digunakan sebagaimana mestinya. Untuk lebih meningkatkan kapasitas sumber daya finansial lima tahun ke depan tentu perlu strategi peningkatan penggalangan dana dari masyarakat, baik melalui penerimaan yang bersumber Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa yang mendaftar di PPs maupun yang bersumber dari pemerintah daerah.

H. Penataan Sarana dan Prasarana

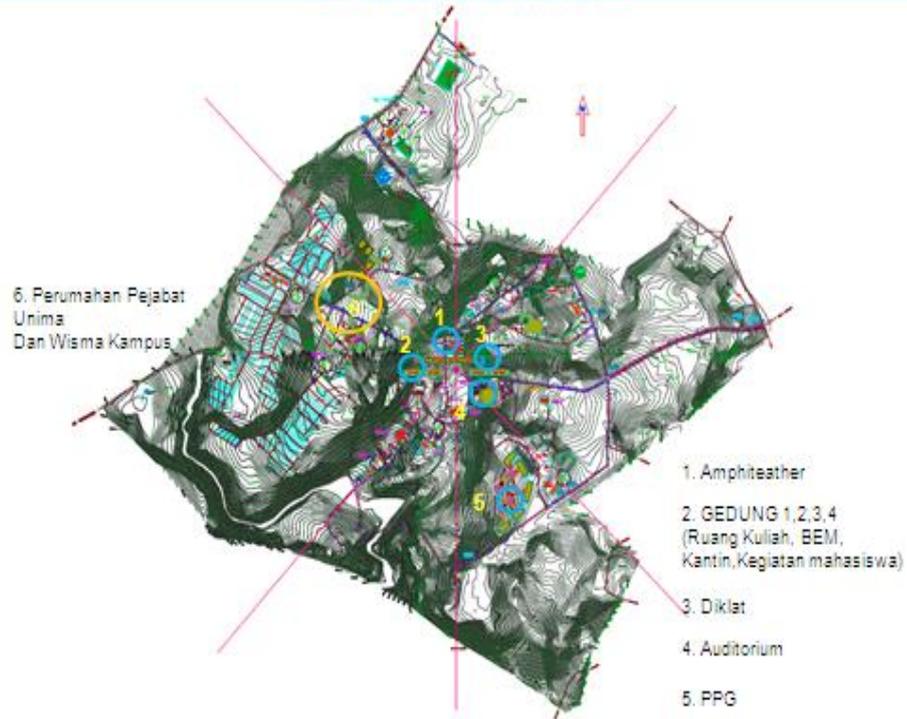
Sarana dan prasarana merupakan sumber daya nonmanusia yang plola secara efisien dan efektif agar dapat menopang pencapaian target-target kinerja PPs. Pengadaan sarana dan prasarana di PPs tergantung pada usulan dan alokasi dana yang tersedia di kantor pusat UNIMA.

Pada akhir tahun 2015 ketersediaan sarana dan prasana di PPs secara umum belum memadai untuk menopang penyelenggaraan aktivitas akademik dan nonakademik. Gedung kantor PPs masih ditempatkan dan atau menyatu dengan auditorium UNIMA. Tahun 2018, sebenarnya telah ada 2 (dua) gedung untuk PPs tetapi gedung yang satu masih digunakan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). Ruang perkuliahannya tidak cukup untuk menampung semua kebutuhan perkuliahan 14 program studi yang ada. Begitu juga dengan ruangan perpustakaan yang tidak memadai untuk diisi koleksi buku dan karya ilmiah berupa tesis dan disertasi dari mahasiswa. Ruangan kerja pimpinan PPs dan pimpinan program studi beluk layak sebagai ruang kantor pejabat. Termasuk pula ruangan pimpinan administratif dari kabag, kasubag/kormin, dan staf administrasi belum layak sebagai ruang kerja perkantoran yang representatif.

Fasilitas berupa komputer, LCD, dan *promothea* yang tersedia belum memadai atau belum memenuhi kebutuhan peningkatan mutu pembelajaran yang diharapkan. Demikian halnya dengan ruangan kerja para dosen belum tersedia dan hal ini sangat menurunkan motivasi para dosen dalam melaksanakan tugas. Tak terkecuali fasilitas internet belum tersedia, sehingga sangat menurunkan tingkat kelancaran pelaksanaan pekerjaan administrasi akademik dan pekerjaan yang terkait dengan belajar para mahasiswa dan mengajar para dosen.

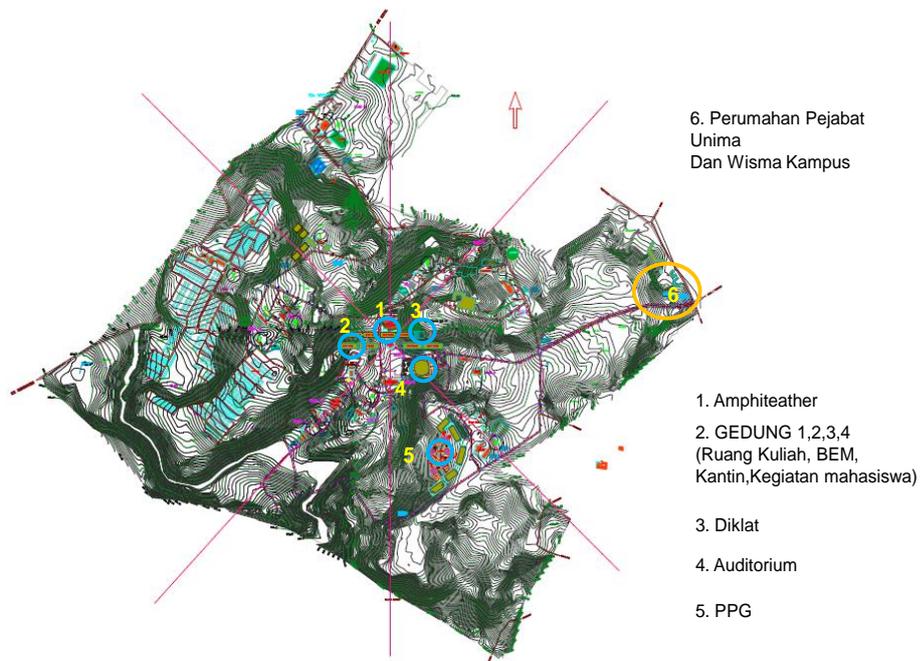
Keterbatasan sarana dan prasaran yang telah dikemukakan tersebut sangat mempengaruhi peningkatan suasana akademik, prestasi kerja para dosen dan staf administrasi (pegawai) serta prestasi belajar para mahasiswa di PPs. Oleh sebab itu dalam periode lima tahun ke depan segala keterbatasan sarana dan prasarana itu akan diperbaiki secara bertahap. Untuk mewujudkan hal itu tentu sangat sangat dibutuhkan komitmen kelembagaan dalam hal pembiayaan, sehingga tahap demi tahap alokasi biaya untuk PPs dapat terpenuhi secara proporsional.

ALTERNATIF RENCANA INDUK 1



Gambar 2.1 Alternatif Rencana Induk 1

ALTERNATIF RENCANA INDUK 2



Gambar 2.2 Alternatif Rencana Induk 2

Terpenuhi kebutuhan penataan sarana dan prasarana di PPs tentu tidak dapat dilepaskan dengan sistem perencanaan UNIMA dalam bentuk *master plan* (rencana induk) tentang pengembangan kampus sampai dengan tahun 2025 yang diarahkan pada modernisasi kampus UNIMA. Diharapkan rencana induk yang dikonsepsikan dalam dua alternatif dapat memenuhi kebutuhan pengembangan kampus UNIMA secara menyeluruh dan termasuk di dalamnya pengembangan kampus PPs pada khususnya. Gambaran dua alternatif rencana induk yang dimaksud disajikan dalam gambar 1 dan 2 pada halaman sebelumnya.

I. Penguatan Kelembagaan dan Sistem Manajemen

Sampai akhir tahun 2015, secara kelembagaan PPs belum sepenuhnya Organisasi dan Tata Kelola (OTK) karena yang sudah OTK baru sebatas Direktur. Kendatipun demikian tidak berarti sistem manajemen di PPs tidak berjalan. Namun, satu hal yang perlu dipahami bahwa keadaan kelembagaan seperti itu dapat mengganggu sistem operasi manajemen yang ada, baik level manajemen menengah, bawah, dan nonmanajemen. Oleh sebab itu, sangat rasional apabila sistem manajemen PPs lebih cenderung sentralisasi daripada desentralisasi. Hal itu terjelaskan melalui sistem manajemen akademik dan sistem penganggaran yang sentralistik.

Dalam rangka penguatan kelembagaan dan sistem manajemen di PPs tentu membutuhkan regulasi dari atasan berupa pemberian otonomi melalui wadah OTK bagi PPs. Atas dasar itu, penataan kelembagaan dan sistem manajemen di PPs pada lima tahun ke depan akan lebih baik dalam arti terjadi peningkatan dalam hal pelaksanaan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian kelembagaan yang berlandaskan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dengan terkondisinya hal-hal itu pada gilirannya PPs akan mengarah pada sistem kelembagaan dan sistem manajemen yang berbasis pada tata kelolola PPs yang baik.

J. Peningkatan Kesejahteraan

Untuk membangun manajemen kinerja yang efektif memerlukan perhatian terhadap tingkat kesejahteraan, terutama dalam bentuk tambahan penghasilan yang berbasis kinerja. Pengembangan sistem kesejahteraan yang berbasis kinerja

merupakan suatu hal yang perlu dipromosikan karena sistem penganggaran pun telah dikembangkan dengan berbasiskan kinerja.

Pad akhir tahun 2015, atas hasil evaluasi kinerja yang dilakukan masih ditemukan adanya honr tertentu yang belum terbayarkan. Namun demikian, secara umum penghasilan tambahan yang diperoleh para pimpinan PPs dan pimpinan program studi serta para dosen dan staf administrasi relatif terpenuhi dengan adanya pemberian insentif material dan nonmaterial. Semuanya itu boleh terjadi karena sistem peningkatan kesejahteraan pada tingkat universitas telah dilakukan antara melalui kebijakan dan kegiatan sebagai berikut.

1. Kesejahteraan, promosi, *reward and punishment* dilakukan berbasis kinerja, baik dosen, pegawai maupun pimpinan.
2. Penjadwalan secara rutin kegiatan rapat tim penilai universitas dan komisi senat serta senat Unima untuk penetapan dan pengusulan kenaikan pangkat dosen.
3. Pengusulan dosen dan pegawai untuk menerima tanda jasa dan penghargaan dari pemerintah pusat.
4. Melaksanakan pemilihan dosen dan pegawai teladan di lingkungan UNIMA dan untuk diusulkan ke tingkat nasional.
5. Penyediaan dukungan dana operasional dalam bentuk kegiatan-kegiatan kepada semua program studi
6. Penyediaan dukungan dana untuk kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat, penulisan modul dan bahan ajar kepada dosen, dan dilaksanakan melalui mekanisme kompetisi.
7. Pelibatan dosen dan staf administrasi dalam kegiatan-kegiatan *ad hoc* seperti kepanitiaan ataupun satuan tugas.
8. Pembinaan dan penindakan terhadap dosen atau pejabat yang melakukan tindakan tidak disiplin baik melalui teguran lisan dan tulisan serta diberhentikan sementara dari tugas.

K. Peningkatan Kerjasama Kelembagaan

Peningkatan kerjasama kelembagaan diarahkan untuk memperkuat jaringan PPs UNIMA dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra sebelumnya. Pada akhiri tahun

2015, kerjasama kelembagaan yang telah dilakukan PPs, kesemuanya dalam kerangka pencapaian target kinerja UNIMA. Kerjasama kelembagaan yang dilakukan selama ini, ada yang diinisiatif oleh PPs dan ada yang diinisiatif pada tingkat universitas, namun dimanfaatkan untuk pemberdayaan PPs. Salah satu insisiasi itu adalah kerjasama kelembagaan antar perguruan tinggi yang terimplementasi melalui pelaksanaan kegiatan seminar internasional *The 4th International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE)*. Di samping itu, kerjasama kelembagaan dengan perpustakaan nasional yang terimplementasi melalui pelaksanaan kegiatan seminar nasional Indonesia *OneSearch* serta inisiasi seminar dan workshop *writing and Publishing Article in Reputable International Journal: Scopus Based*.

Diharapkan hal-hal yang sudah dilakukan itu dapat ditingkatkan pada lima tahun mendatang dengan memperbanyak kerjasama dan implementasinya agar target kinerja PPs lebih tinggi pecaiaannya. Harapan ini dapat terwujud apabila mendapat sokongan dana *stakeholders* terutama dana yang bersumber dari universitas. Di samping itu, kerjasama kelembagaan yang dilakukan pada tingkat universitas dapat dimanfaatkan PPs sebagai bagian dari strategi memperluas jaringan kerjasama kelembagaan.

BAB III

ANALISIS SITUASI, ISU-ISU STRATEGIS, DAN TANTANGAN

A. Analisis Situasi

Analisis situasi PPs UNIMA dapat dibagi atas analisis kondisi internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dan analisis kondisi eksternal yang meliputi peluang dan ancaman.

1. Analisis Kondisi Internal

Analisis kondisi internal PPs didasarkan pada kondisi terkini mengenai kekuatan dan kelemahan yang ada.

a. Kekuatan

- 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan PPs dan pimpinan dalam melakukan pecegahan dan penanggulangan terhadap tindak plagiarisme dan pungutan liar serta pelanggaran kode etik.
- 2) Memiliki 10 program studi kependidikan pada jenjang S2 dan 3 program studi non kependidikan serta 1 program studi pada jenjang S3 yang mampu menghasilkan sumber daya manusia dengan modal kompetensi lulusan yang dibutuhkan dalam pasar kerja di bidang pemerintahan dan non pemerintahan.
- 3) Memiliki 8 program studi yang telah terakreditasi B.
- 4) Memiliki staf pengajar (dosen) yang berkualifikasi S3 dan bersertifikat pendidik dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor.
- 5) Tersedianya sarana belajar dan prasarana gedung yang representatif untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan akademik.
- 6) tersedianya sistem rekrutman mahasiswa baru yang bersifat manual dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memudahkan bagi calon mahasiswa baru untuk mendaftarkan di PPs.
- 7) Tersedianya fasilitas belajar yang dapat menunjang aktivitas belajar mahasiswa di kampus PPs.

- 8) Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan PPs yang memudahkan mahasiswa memperoleh sumber belajar tertulis berupa buku dan karya ilmiah berupa tesis dan disertasi.
- 9) Kepercayaan pemerintah pusat melalui pimpinan universitas untuk mendirikan program studi baru di PPs.
- 10) Telah dibentuknya Unit Penjaminan Mutu pada tingkat PPs dan Gugus Mutu pada tingkat program studi.
- 11) Kepercayaan institusi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi swasta/negeri membangun kerjasama dengan PPs.
- 12) Memadainya dukungan alokasi pembiayaan, baik yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun Rupiah Murni (RM) untuk operasional PPs.
- 13) Iklim akademik yang kondusif dalam menopang usaha-usaha peningkatan mutu akademik di PPs.
- 14) Komitmen yang kuat dari pimpinan PPs dan pimpinan program studi terhadap peningkatan mutu kelembagaan PPs.
- 15) Motivasi kerja dan motivasi berprestasi para dosen yang tinggi dalam melaksanakan layanan pembelajaran di setiap program studi.
- 16) Tersedianya tenaga administrasi PPs untuk mendukung pekerjaan administratif akademik dan non akademik di PPs.

b. Kelemahan

- 1) Belum ada program studi yang terakreditasi A dan masih ada program studi yang belum reakreditasi dan diakreditasi.
- 2) Belum tersedianya fasilitas internet yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen dalam menunjang kelancaran proses kerja dalam bidang urusan akademik dan kemahasiswaan.
- 3) Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran antara unit penjaminan mutu dan gugus mutu dengan pimpinan program studi belum berjalan secara efisien dan efektif.
- 4) Sistem perencanaan program dan anggaran yang tersentralisasi di UNIMA berpotensi mengganggu kelancaran sistem otonomi manajemen program dan anggaran di PPs.

- 5) Keberadaan PPs yang belum memenuhi standar Organisasi dan Tata Kelola (OTK) turut mempengaruhi peningkatan efisiensi dan efektifitas manajemen PPs.
- 6) Usaha-usaha peningkatan mutu yang belum diikuti dengan budaya mutu.
- 7) Manajemen akademik belum sepenuhnya memanfaatkan ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- 8) Dalam rangka implementasi fungsi-fungsi manajemen ketersediaan perangkat manajemen seperti panduan, SOP masih perlu pembenahan.
- 9) Masih kurangnya aktivitas akademik di PPs yang mendukung peningkatan iklim akademik yang kondusif.
- 10) Produktivitas para dosen dalam menghasilkan karya ilmiah, baik penelitian maupun publikasi ilmiah yang belum dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.
- 11) Proses pengambilan keputusan dan pelaporan di PPs belum efisien dan efektif karena belum tertata dengan baik sistem *data-base* dan atau sistem informasi manajemen.
- 12) Penguasaan bahasa PPB terutama bahasa Inggris dikalangan dosen dan mahasiswa serta staf administrasi masih belum cukup kuat dan belum merata, sehingga agak mengganggu percepatan daya saing PPs.
- 13) Sikap dan perilaku kompetitif belum terbangun secara kuat di kalangan para dosen dan mahasiswa.
- 14) Derajat kewirausahaan di kalangan dosen dan mahasiswa belum tumbuh dan berkembang secara maksimal karena potensi daya kreatif, inovatif, dan jiwa produktif belum secara sungguh-sungguh didayagunakan secara optimal dalam proses pengembang diri dan perbaikan mutu proses dan hasil pembelajaran.
- 15) Pengelolaan aset-aset PPs yang kurang efektif, sehingga kurang termanfaatkan secara optimal untuk pengembangan PPs.
- 16) Belum tersedianya sistem deteksi terhadap tindak plagiarisme dan kebijakan khusus untuk pencegahan dan penanggulangannya.

- 17) Tata layanan pembelajaran dan administrasi akademik/nonakademik masih lebih banyak dilakukan secara manual, sehingga mengalami kelambatan proses pelayanan.
- 18) Belum tersedianya secara memadai ruangan khusus untuk pelaksanaan seminar tesis/disertasi dan ujian tesis/disertasi.

2. Analisis Kondisi Eksternal

Analisis kondisi eksternal PPs didasarkan pada kondisi terkini mengenai peluang dan ancaman yang ada.

a. Peluang

Peluang pengembangan kelembagaan PPs ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Kepercayaan masyarakat terhadap PPs yang semakin tinggi yang ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPs.
- 2) Kepercayaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap PPs yang menempatkan PPs sebagai mitra strategis untuk melaksanakan berbagai program unggulan dan strategis serta program penguatan kapasitas institusi.
- 3) Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Memorandum of Agreement* (MoA) kerjasama kelembagaan PPs yang semakin luas baik antar perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam negeri, dengan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota, dan dengan berbagai institusi pemerintah dan non pemerintah seperti legislatif, yudikatif, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat.
- 4) Otonomi perguruan tinggi sebagai pengejawantahan dari desentralisasi pendidikan memberikan peluang bagi setiap perguruan tinggi untuk mengembangkan berbagai potensi, mengelola, dan memanfaatkannya bagi pengembangan perguruan tinggi pada umumnya dan PPs pada khususnya.
- 5) Peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diikuti dengan berbagai Peraturan Pemerintah dan peraturan Menteri

Ristekdikti memberi landasan hukum dan ruang pengembangan otonomi, potensi dan kreativitas yang lebih kuat bagi PPs.

- 6) Perkembangan regional dan global dengan didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi peluang bagi setiap PPs UNIMA untuk memperkuat aksesibilitas dalam membangun jejaring.
- 7) Tawaran-tawaran kerjasama kelembagaan baik perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, lembaga-lembaga keuangan, industri, dan lain sebagainya yang semakin terbuka memberi ruang gerak bagi pengembangan dan peningkatan berbagai program akademik dan penguatan kapasitas kelembagaan PPs.
- 8) Penembangan pembelajaran masa kini dan masa depan yang berbasis teknologi infirmasi dan komunikasi dengan model-model pembelajaran seperti *blended learning*, mengharuskan pengembangannya pada setiap program studi di PPs, sehingga dapat melayani mahasiswa di gela tempat dan waktu secara terstruktur dan fungsional dalam rangka pendidikan jarak jauh (PJJ) atau Belajar jarak jauh (BJJ) dan pendidikan sepanjang hayat.

b. Ancaman

Ancaman terhadap pengembangan kelembagaan PPs ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan dan perkembangan Program Pascasarjana, baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, yang semakin bermutu dan makin relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri jelas akan semakin meningkatkan persaingan tajam dalam kaitannya dengan rekrutmen mahasiswa, proses pendidikan, dan dalam menghasilkan lulusan.
- 2) Tuntutan kesetaraan dan daya saing kemampuan profesional lulusan PPs dengan lulusan PPs di perguruan tinggi lainnya dan pasar tenaga kerja baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (asing).
- 3) Aksesibilitas masuk PPs baik di dalam mupun di luar negeri yang semakin terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

- 4) Menguatnya dan mengedepannya internasionalisasi perguruan tinggi luar negeri menyelenggarakan program pendidikan di Indonesia semakin meningkatkan tingkat persaingan yang akan berdampak pada pengembangan PPs.
- 5) Meningkatnya animo calon mahasiswa menjadi pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga non kependidikan, seiring dengan peningkatan status dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan akan mendorong PPs untuk secara terus menerus meningkatkan mutu pendidikan pada setiap program studi.
- 6) Persaingan lulusan yang semakin ketat dalam merebut peluang pasar kerja, baik tenaga kerja dari dalam negeri maupun tenaga kerja dari luar negeri akan mendorong daya saing lulusan setiap program studi di PPs.
- 7) Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi baik lokal, regional, nasional maupun internasional yang seringkali cenderung menghadapi krisis harus disadari akan berdampak pada kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk mendanai pendidikan tinggi.
- 8) Tuntutan pemangku kepentingan pendidikan (*stakeholders*) terhadap kemampuan profesional tenaga pendidik, kependidikan, dan nonpendidik sebagai lulusan yang akan dihasilkan, menempatkan PPs secara terus menerus menjamin akuntabilitas dan transparansi baik akademik, finansial maupun sosial penyelenggara pendidikan serta lulusan.
- 9) Globalisasi yang makin menuntut kompetensi lulusan mengharuskan penyesuaian pengembangan kurikulum dan capaian pembelajaran pada setiap program studi di masa depan.
- 10) Perubahan yang begitu cepat dan kadangkala membingungkan di tengah masyarakat sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan setiap program studi di PPs berbenah diri agar para lulusannya tidak ketinggalan zaman.

3. Analisis Kekuatan dan Peluang

Analisis kekuatan dan peluang yang teridentifikasi perlu dikombinasikan agar menjadi kekuatan pendorong terhadap pengembangan PPs ke depan. Atas

dasar kombinasi itu dapat dideskripsikan seperangkat keuntungan dari kekuatan dan peluang sebagai berikut.

- a. Memanfaatkan peluang bagi peningkatan kemampuan staf pengajar (dosen), sehingga dapat dicapai kualifikasi pendidikan kompetensi. Artinya jumlah dosen berpendidikan S3 untuk setiap program studi sudah harus memenuhi kualifikasi pendidikan.
- b. Meemperluas kerjasama kelembagaan dengan *stakeholders* dan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota dalam rangka memperkuat kapasitas *enrollment*, sumber daya dana, dan sarana prasarana pendidikan.
- c. Meningkatkan dan memperluas kerjasama kelembagaan dengan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kapasitas institusi dan *academic standing Unima*
- d. Meningkatkan sistem jaringan informasi berbasis teknologi dengan memperkuat sistem manajemen informasi, dan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi.
- e. Memperkuat kemampuan memperoleh *grant* melalui berbagai program hibah kompetitif dalam upaya mendukung kapasitas finansial dan memperkuat sumber daya sarana dan prasarana serta fasilitas pembelajaran.
- f. Memperkuat dan semakin meningkatkan komitmen civitas akademika, yaitu dosen dan mahasiswa dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan PPs.

4. Analisis Kelemahan dan Peluang

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh PPs dapat minimalisir dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan manajemen sumber daya. Kapasitas sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, sumber daya dana, dan sumber daya sarana dan prasarana. Manajemen sumber daya diarahkan dengan memperkuat tata kelola (*governance*) yang baik dan akuntabel. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan merebut berbagai peluang *grant* atau dana hibah yang tersedia melalui berbagai program kompetisi yang diadakan oleh Kemristekdikti.

- b. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sistem jaringan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengembangkan pembelajaran berbasis mutlimedia.
- c. Meningkatkan produktivitas dengan menghasilkan lulusan dalam memenuhi peluang dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia diberbagai daerah.
- d. Meningkatkan produktivitas dosen dalam menghasilkan penelitian-penelitian inovatif, karya ilmiah, dan publikasi dengan memanfaatkan berbagai jaringan komunikasi ilmiah baik jurnal ilmiah maupun elektronik.

5. Analisis Ancaman dan Kekuatan

Ancaman-ancaman eksternal yang akan dihadapi, perlu diantisipasi dengan mengerahkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Oleh sebab itu kekuatan yang perlu dikerahkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen pimpinan, dosen, dan mahasiswa, sehingga dapat dicapai sinergitas yang tinggi seluruh potensi civitas akademika dalam upaya meningkatkan mutu dan relevansi lulusan agar dapat bersaing dengan lulusan dari berbagai perguruan tinggi di daerah Sulawesi Utara dan daerah luar daerah Sulawesi Utara.
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dosen dan mahasiswa serta tenaga pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- c. Mengoptimalkan pendayaagunaan sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia melalui perbaikan manajemen sarana dan prasarana.
- d. Memperkuat jaringan kerjasama kelembagaan dengan *stakeholders* terutama satuan pendidikan sekolah, satuan kerja pemerintah seperti dinas pendidikan, orang tua mahasiswa, swasta, dan masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan pendidikan di PPs.

6. Analisis Ancaman dan Kelemahan

Ancaman dan kelemahan yang diidentifikasi dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi upaya pengembangan PPs. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap ancara dan kelemahan.

- a. Mengoptimalkan seluruh potensi yang menjadi kekuatan PPs terutama potensi sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya sarana dan prasarana.
- b. Meningkatkan kemampuan manajemen berbagai sumber daya yang tersedia, sehingga dapat dicapai tingkat efisiensi dan efektivitas serta produktivitas yang tinggi.
- c. Meningkatkan jaringan kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak, sehingga dalam meningkatkan kapasitas sumber daya, terutama penyediaan fasilitas pembelajaran yang dapat menopang capaian-capaian pembelajaran.
- d. Meningkatkan partisipasi *stakeholders* internal dan eksternal dalam pelayanan pendidikan di PPs. Partisipasi dari *stakeholders* tersebut sangat penting untuk meningkatkan kapasitas finansial dan atau anggaran pendidikan di PPs.
- e. Meningkatkan kapasitas dan fungsi manajemen sistem informasi akademik, mahasiswa, dosen, dan administrasi serta sarana dan prasarana..

B. Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dikemukakan, dapat dirumuskan tiga isu strategis yang imperatif dalam konteks layanan pendidikan di PPs.

1. Isu strategis Ketersediaan Layanan Pendidikan.

- a. Ketersediaan layanan pendidikan berkenaan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang diarahkan pada usaha-usaha memperluas daya tampung PPs dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua masyarakat dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.
- b. Ketersediaan layanan pendidikan dimaksudkan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang sama pada jenjang pendidikan magister dan doktor dan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata melalui pendidikan magister dan doktor.

- c. Ketersediaan layanan pendidikan bukan hanya diarahkan untuk memenuhi sisi kuantitas, melainkan juga diarahkan untuk memenuhi sisi kualitas yang dilaksanakan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu internal PPs.

2. Isu Kualitas dan Relevansi Layanan Pendidikan

- a. Kualitas dan relevansi layanan pendidikan di PPs diarahkan menuju sesuatu yang baik atau untuk memenuhi standar tertentu seperti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Peningkatan mutu layanan pendidikan dapat dilaksanakan pada masukan dan keluaran, proses, guru, sarana/prasarana, dan biaya yang dikeluarkan untuk layanan pendidikan.
- b. Kualitas layanan pendidikan dapat ditingkatkan apabila proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga mahasiswa dapat mengalami proses belajar yang berarti dan menyenangkan serta ditunjang dengan sumber daya seperti dosen, sarana/prasarana, dan biaya yang memadai. Proses pembelajaran yang bermutu akan menghasilkan lulusan program studi di PPs yang mampu belajar sepanjang hayat dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Relevansi layanan pendidikan diarahkan untuk melihat kesesuaian antara pendidikan di program studi dengan lapangan usaha setelah mereka lulus, sehingga mampu menjadi tenaga kerja terampil tingkat tinggi. Ditinjau dari kurikulum yang dikembangkan dalam program studi ada kecenderungan masih menekankan pada penentuan cakupan materi, sehingga perlu dilakukan perubahan yang lebih mengarah pada kurikulum yang berbasis kompetensi dan lebih bersifat adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Gambaran kondisi seperti itu menunjukkan bahwa relevansi pendidikan pada setiap program studi di PPs belum sesuai dengan lapangan atau pasar kerja. Hal itu menyebabkan mutu pendidikan menjadi kurang berhasil karena sistem yang ada belum mendukung sepenuhnya.

3. Isu Keterjaminan Tata Kelola Layanan Pendidikan

- a. Untuk mengembangkan tata kelola yang baik perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi serta keterbukaan.

- b. Keterjaminan tata kelola layanan pendidikan di PPs dapat dilaksanakan dengan mengembangkan sistem pembiayaan berbasis kinerja dan efisiensi atau berdaya guna dalam arti dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada seperti uang, waktu, dan tenaga.
- c. Keterjaminan tata kelola layanan pendidikan di PPs dapat dilaksanakan dengan mengembangkan manajemen berbasis program studi.
- d. Untuk mewujudkan tata kelola layanan pendidikan yang baik tentu isu-isu seperti pengembangan sistem pengendalian internal, pengawasan publik, dan pengawasan fungsional yang terintegrasikan dan dilaksanakan secara terus-menerus perlu menjadi agent of change dalam pengembangan PPs.

C. Harapan *Stakeholders* terhadap PPs

Harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terus berdinamika seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian halnya dengan PPs UNIMA sebagai suatu institusi akan terus berdinamika seiring dengan perkembangan dan aspirasi kependidikan serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

Secara logis, pada saat didirikan masyarakat berharap kelembagaan UNIMA yang di dalamnya unit kerja PPs bisa berperan sebagai agen pendidikan (*agent of education*). Untuk memenuhi harapan tersebut penyelenggaraan pendidikan di PPs hendaknya didasarkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai dasar penjenjangan kualifikasi kompetensi, terutama jenjang kualifikasi 8 (delapan) untuk program magister dan 9 (sembilan) untuk program doktor. Jenjang kualifikasi kedelapan meliputi: (1) mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, (2) mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner, dan (3) mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Sedangkan jenjang kualifikasi kompetensi kesembilan meliputi: (1) mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek

profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji, (2) mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner, dan (3) mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Selain memenuhi KKNi tersebut PPs yang memainkan peran sebagai agen pendidikan diharapkan juga dalam pengelolaan dan penyelenggarannya dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang meliputi: (1) standar nasional pendidikan, (2) standar nasional penelitian, dan (3) standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Ketiga SNPT tersebut, masing-masing dibagi atas 8 (delapan) lingkup standar yang meliputi: (1) standar kompetensi, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar penilaian, (5) standar dosen dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) standar pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan.

Pada saat PPs secara relatif sudah mampu berperan sebagai *agent of education*, aspirasi masyarakat terus bertumbuh dan berkembang dengan berharap PPs memainkan dapat peran sebagai agen penelitian dan pengembangan (*agent of research and development*). Untuk memenuhi harapan tersebut telah ditetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mana masing-masing dibagi atas 8 (delapan) lingkup standar yang meliputi: (1) standar kompetensi, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar penilaian, (5) standar dosen dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) standar pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan.

Harapan masyarakat terus bertumbuh dan berkembang, sehingga berlanjut sampai sekarang ini yang mana berharap PPs dapat berperan sebagai agen transfer pengetahuan dan teknologi (*agent of knowledge and technology transfer*) dan lebih menajam ke peran sebagai agen pengembangan ekonomi (*agent of economic development*). Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat dapat secara berarti berperan sebagai *agent of economic development*, PPs dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang yang dihasilkan melalui proses pendidikan dan proses

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi ekonomis bagi masyarakat.

Untuk memenuhi berbagai aspirasi dan harapan tersebut tentu saja perlu pembenahan terhadap PPs UNIMA. Langkah strategi yang perlu dilakukan untuk memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat itu adalah pengembangan PPs yang diarahkan pada usaha-usaha memenuhi SNPT, baik standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan selain diarahkan untuk pemenuhan terhadap standar-standar minimal tersebut, sekaligus juga didorong kuat untuk memenuhi standar-standar regional dan internasional sebagai bagian dari dinamika dalam era globalisasi.

D. Tantangan Pengembangan PPs

Berdasarkan analisis kondisi internal dan kondisi eksternal yang telah diuraikan dapat diidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di PPs lima tahun ke depan.

1. Pengembangan kurikulum yang memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Peningkatan kualitas yang diarahkan pada upaya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP), baik standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian maupun standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
3. Memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme.
4. Menghasilkan SDM cerdas, berkarakter, dan berdaya saing melalui pendidikan intelektual/akademik dan pendidikan karakter yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif.
5. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja.
6. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi.
7. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan unit kerja lain dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta masyarakat secara luas.
8. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD;

9. Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk mendukung kelembagaan UNIMA menuju Badan Layanan Umum (BLU).
10. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.
11. Menyediakan lulusan PPs yang memiliki kemampuan akademik yang berhubungan langsung dengan bidang ilmu yang ditekuni di program studi.
12. Mengembangkan pendidikan intelektual dan pendidikan karakter yang relevan dengan kebutuhan kompetensi SDM di abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, komunikasi, kerja dalam tim, pengambilan keputusan, inovatif, dan kepemimpinan serta berkarakter religius, mandiri, nasionalisme, dan integritas.
13. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal PPs yang didukung dengan sistem tata kelola yang baik.
14. Pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang berkaitan dengan profesi yang mensyaratkan keahlian agar berkinerja baik dalam suatu bidang pekerjaan.

E. Harapan Masyarakat

Selain isu-isu strategis yang telah dideskripsikan, isu ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap keberadaan Program Pascasarjana (PPs) terus berkembang seiring dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Pada awalnya, kehadiran PPs di tengah masyarakat cenderung dituntut dapat memainkan dirinya secara berarti sebagai suatu agen pendidikan (*agent of education*) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pascasarjana (S2 dan S3) bagi masyarakat yang membutuhkan. Hasil dari respon PPs terhadap harapan masyarakat itu ialah dilahirkan lulusan-lulusan yang bergelar magister dan doktor dalam berbagai bidang ilmu.

Seiring dengan dinamika perubahan tatanan kehidupan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan yang terus berkembang, harapan masyarakat terhadap PPs pun turut berkembang. Jika sebelumnya harapan masyarakat menuntut PPs memerankan dirinya sebagai agen pendidikan, maka tuntutan berikutnya ialah sebagai agen penelitian dan pengembangan (*agent of research and development*). Hasil dari respons PPs terhadap harapan masyarakat itu

bermunculan berbagai hasil penelitian dan pengembangan. Namun, hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan itu cenderung hanya menjadi kekayaan intelektual semata dan tidak dimanfaatkan bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Menjawan harapan masyarakat agar hasil penelitian dan pengembangan dimanfaatkan bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat keberadaan mengubah perannya secara lebih berarti sebagai agen transfer pengetahuan dan teknologi (*agen of knowledge and technology transfer*). Ketika masyarakat melihat transfer pengetahuan dan teknologi hanya menjadi kekayaan atau modal sosial bagi masyarakat, maka harapan masyarakat pun berubah. Perubahan harapan masyarakat tersebut dikaitkan dengan peningkatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, masyarakat mengharapkan agar PPs memerankan dirinya secara lebih berarti sebagai agen pengembangan ekonomi (*agent of economic development*). Harapan masyarakat yang tinggi ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi PPs untuk memerankan dirinya secara lebih bermakna sebagai agen perubahan ekonomi masyarakat agar pendapat masyarakat terus meningkat dan terhindar dari kemiskinan. Dengan kata lain, perolehan tingkat pendidikan, perolehan hasil penelitian dan pengembangan, dan perolehan transfer pengetahuan dan teknologi yang hanya berfungsi sebagai modal sosial, hendaknya diakumulasi secara terintegrasi dengan pengembangan ekonomi agar berfungsi sebagai modal ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memainkan dirinya sebagai agen yang mampu melahirkan tatanan masyarakat yang memiliki modal sosial dan modal ekonomi tentu PPs perlu melakukan terobosan dalam bidang inovasi agar menghasilkan aneka inovasi yang bisa berdampak positif dalam bentuk mendatangkan kemanfaatan langsung terhadap perbaikan ekonomi bagi masyarakat. Aneka inovasi yang dapat dihasilkan itu bisa berasal dari dosen dan mahasiswa Program studi di PPs yang menggeluti bidang kependidikan dan nonkependidikan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi dan Misi Program Pascasarjana

Secara organisatoris, visi UNIMA adalah cerminan dari visi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Hal itu dimaksudkan agar target-target kinerja UNIMA juga dalam kerangka pencapaian target-target kinerja Kemristekdikti. Demikian halnya dengan Program Pascasarjana (PPs) yang merupakan suatu unit kerja dalam lingkup kelembagaan UNIMA. Itu berarti visi PPs haruslah terkandung di dalam visi UNIMA. Atas dasar itu visi PPs UNIMA dirumuskan sebagai berikut.

**Visi PPs 2020:
“Terwujudnya Layanan Prima Pendidikan untuk
Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang
Berkarakter, Cerdas, dan Berdaya Saing”**

Layanan prima pendidikan yang dimaksud adalah layanan pendidikan yang **tersedia** secara merata dan setara bagi semua mahasiswa pada setiap program studi; **berkualitas** dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; dan **menjamin** kepastian memperoleh pendidikan berdasarkan standar nasional dan internasional. Keberhasilan pelaksanaan layanan pendidikan yang dimaksud pada gilirannya akan menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing secara nasional, regional, dan internasional.

Makna SDM **berkarakter** merujuk pada insan berkarakter religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan berintegritas. Pendidikan karakter perlu dijadikan sebagai jantung pendidikan di PPs untuk maksud diseimbangkan dengan pendidikan intelektual/akademik; SDM **cerdas** merujuk pada insan yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetik; dan SDM **berdaya saing** merujuk pada insan yang berkepribadian unggul, inovatif, kreatif, produktif, agen perubahan, pembelajar sepanjang hayat, dan berorientasi global.

Untuk mencapai visi PPs UNIMA tersebut dirumuskan misi PPs UNIMA yang dikemas dalam “Misi 3K” sebagai berikut.

Kode	Misi (M)
M1	Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan.
M2	Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan
M3	Meningkatkan keterjaminan tata kelola layanan pendidikan.

B. Tata Nilai

Tata nilai adalah landasan sekaligus arah sikap dan perilaku seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh sivitas akademika dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah **demokratis, profesional, pemberdayaan, inklusif, berintegritas, dan berkeadilan.**

Jika merujuk pada visi dan misi serta lima tata nilai tersebut, maka dipilih yang sesuai dengan fokus periode ini yakni layanan prima pendidikan dan dirangkum dalam satu kalimat motto PPs UNIMA sebagai berikut.

Melayani Semua secara Profesional

C. Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis 2016--2020

Untuk menunaikan misi dan mencapai visi PPs UNIMA perlu dirumuskan tujuan strategis dan sasaran strategis tahun 2016—2020. Pada dasarnya tujuan strategis dan sasaran strategis itu menggambarkan ukuran-ukuran penunaian misi dan tercapainya visi PPs.

1. Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi PPs tentu perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional yakni berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Tujuan strategis PPs tahun 2016--2020 dirumuskan berdasarkan jenjang program pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk mewujudkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2020 PPs dengan memperhatikan rumusan misi PPs 2016--2020. Dengan demikian, tujuan strategis PPs tahun 2016--2020 sebagai berikut.

Kode	Tujuan Strategis (T)
T1	Tersedia, berkualitas, dan terjaminnya layanan pendidikan program magister yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
T2	Tersedia, berkualitas, dan terjaminnya layanan pendidikan pada program doktor yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
T3	Tersedia, berkualitas, dan terjaminnya sistem tata kelola yang baik untuk menopang terwujudnya layanan prima pendidikan.

2. Sasaran Strategis

Untuk keperluan pengukuran dan penilaian ketercapaian tujuan PPs UNIMA diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2020. Sasaran strategis untuk tiap tujuan tersebut dirumuskan sebagai berikut.

a. Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis T1

Kode	Sasaran Strategis (S)
S1.1	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa mencapai 3,25
S1.2	Kelulusan mahasiswa mencapai 95%
S1.3	Lulusan yang langsung bekerja sesuai bidang keahlian mencapai 75%
S1.4	Rata-rata lama studi mahasiswa S2 mencapai 2,25
S1.5	Mahasiswa <i>dropout</i> mencapai 0,01%
S1.6	Ketersediaan kurikulum prodi S2 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mencapai 100%
S1.7	Ketersediaan perangkat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mencapai 100%
S1.8	Dosen berkualifikasi S3 mencapai 100% dan bersertifikat profesi mencapai 100%
S1.9	Dosen dengan jabatan lektor kepala mencapai 85% dan jabatan profesor mencapai 25%
S1.10	Sekurang-kurangnya 26 publikasi nasional dan 15 publikasi internasional.
S1.11	Sekurang-kurangnya 15 HKI yang didaftarkan
S1.12	Hasil penelitian Dosen mencapai 17%
S1.13	Hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen mencapai 13%
S1.14	Sekurang-kurangnya 7 buku ajar
S1.15	Sekurang-kurangnya 10 prodi S2 terakreditasi minimal B

b. Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis T2

Kode	Sasaran Strategis (S)
S2.1	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa mencapai 3,35
S2.2	Kelulusan mahasiswa mencapai 95%
S2.3	Lulusan yang langsung bekerja sesuai bidang keahlian mencapai 95%
S2.4	Rata-rata lama studi mahasiswa S2 mencapai 3,5
S2.5	Mahasiswa <i>dropout</i> mencapai 0,01%
S2.6	Ketersediaan kurikulum setiap prodi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mencapai 100%
S2.7	Ketersediaan perangkat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap program mencapai 100%
S2.8	Dosen berkualifikasi S3 mencapai 100% dan bersertifikat profesi mencapai 100%
S2.9	Dosen dengan jabatan lektor kepala mencapai 85% dan jabatan profesor mencapai 25%
S2.10	Sekurang-kurangnya 6 publikasi nasional dan 6 publikasi internasional.
S2.11	Sekurang-kurangnya 5 HKI yang didaftarkan
S2.12	Hasil penelitian Dosen mencapai 67%
S2.13	Hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen mencapai 50%
S2.14	Sekurang-kurangnya 3 buku ajar
S2.15	Akreditasi prodi S3 minimal B

c. Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis T3

S3.1	SOP dan implementasinya mencapai 100%
S3.2	Realisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya mencapai 100%
S3.3	Pelaporan penggunaan anggaran setiap tahunnya mencapai 100%
S3.4	Prodi terkoneksi ke SIA mencapai 100%
S3.5	Pengisian nilai matakuliah oleh dosen terkoneksi ke SIA mencapai 100%
S3.6	Kerjasama yang ditindaklanjuti mencapai 100%
S3.7	Sekurang-kurangnya 14 dosen ikutserta dalam seminar nasional/internasional

BAB V

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Strategi Pengembangan

Strategi dan arah kebijakan pengembangan PPs tahun 2016--2020 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di PPs terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis.

Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu.

1. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T1

Tujuan strategis T1, yakni tersedia, berkualitas, dan terjaminnya layanan pendidikan magister yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dapat dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- a. Penyediaan dosen program magister (S2) berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, berkesetaraan, dan berdaya saing.
- b. Peningkatan kualitas pengelolaan PPs untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel.
- c. Penyediaan data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi serta keterlaksanaan akreditasi.
- d. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran yang berkualitas dan berdaya saing yang merata di seluruh prodi.
- e. Peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, berdaya saing nasional dan atau internasional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Penyediaan dukungan pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran berbasis TIK yang berkualitas.

Tahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1 ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T1

Kode	Sasaran Strategis	Kondisi Awal 2015	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka rata-rata IPK	3,42	3,42	3,42	3,45	3,45	3,5
2	Persentase lulusan	20%	25%	30%	40%	50%	70%
3	Persentase lulusan yang langsung bekerja	50%	55%	60%	65%	70%	75%
4	Mahasiswa <i>dropout</i>	-	-	0,02	0,01	0,01%	0,01%
5	Persentase Dosen berkualifikasi S3	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Dosen bersertifikat profesi	90%	91%	92%	93%	95%	100%
7	Persentase Dosen dengan jabatan lektor kepala	46%	47%	48%	49%	50%	85%
8	Persentase Dosen dengan jabatan profesor	16%	18%	19%	21%	23%	25
9	Jumlah publikasi nasional	5	7	10	15	20	26
10	Jumlah publikasi internasional	1	3	5	9	13	15
11	Jumlah HKI yang didaftarkan	-	5	7	10	13	15
12	Jumlah prodi terakreditasi minimal B	-	-	-	8	11	13
13	Jumlah buku ajar	-	-	4	5	6	7
14	Persentase ketersediaan kurikulum prodi sesuai KKNI	-	-	50%	100%	100%	100%
15	Persentase ketersediaan perangkat RPS	-	-	50%	100%	100%	100%
16	Jumlah monitoring dan evaluasi perkuliahan oleh Prodi	-	-	-	4	4	4

17	Jumlah dosen yang mengikuti seminar nasional dan internasional	Nd*)	Nd	Nd	10	10	14
----	----------------------------------------------------------------	------	----	----	----	----	----

Nd*) : Nondeterminasi

2. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T2

Tujuan strategis T2, yakni tersedia, berkualitas, dan terjaminnya layanan pendidikan doktor yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dapat dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- a. Penyediaan dosen program doktor (S3) berkompoten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, berkesetaraan, dan berdaya saing.
- b. Peningkatan kualitas pengelolaan PPs untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel.
- c. Penyediaan data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan tinggi.
- d. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran yang berkualitas dan berdaya saing.
- e. Peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, berdaya saing nasional dan atau internasional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran berbasis TIK yang berkualitas.

Tahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2 ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T2

Kode	Sasaran Strategis	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka rata-rata IPK	3.05	3,25	3,35	3,5	3,55	3,6
2	Persentase lulusan	45%	50%	60%	65%	70%	75%
3	Persentase lulusan yang langsung bekerja	60%	68%	73%	75%	77%	80%
4	Mahasiswa <i>dropout</i>	-	-	0,02	0,01	0,01%	0,01%
5	Persentase Dosen	90%	100%	100%	100%	100%	100%

	berkualifikasi S3						
6	Persentase Dosen bersertifikat profesi	50%	50%	50%	83%	100%	100%
7	Persentase Dosen dengan jabatan lektor kepala	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Dosen dengan jabatan profesor	50%	50%	83%	83%	83%	75%
9	Jumlah publikasi nasional	-	1	3	4	4	5
10	Jumlah publikasi internasional	-	1	2	3	4	5
11	Jumlah HKI yang didaftarkan	-	-	3	3	4	5
12	Akreditasi prodi minimal B	-	-	-	C	C	B
13	Jumlah buku ajar	1	2	2	3	3	3
14	Persentase ketersediaan kurikulum prodi sesuai KKNI	-	-	50%	100%	100%	100%
15	Persentase ketersediaan perangkat RPS	-	-	50%	100%	100%	100%
16	Persentase monitoring dan evaluasi perkuliahan oleh prodi	-	-	-	2	2	2
17	Jumlah dosen mengikuti seminar nasional dan internasional	Nd*)	Nd	Nd	10	10	14

Nd*) : Nondeterminasi

3. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T3

Tujuan strategis T3, yakni tersedia, berkualitas, dan terjaminnya tata kelola yang menopang terwujudnya layanan prima pendidikan, dapat dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- a. Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis.
- b. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset milik negara.
- c. Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal PPs.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T3 ditunjukkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T3

Kode	Sasaran Strategis	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase SOP dan implementasinya	25%	50%	65%	75%	100%	100%
2	Persentase realisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pelaporan penggunaan anggaran setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase prodi terkoneksi ke SIA	-	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pengisian nilai matakuliah oleh dosen terkoneksi ke SIA	-	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	-	1	1	1	1	2

4. Strategi Umum

Bertolak dari seluruh strategi pembangunan pendidikan tersebut dapat dirumuskan ke dalam strategi umum yang tertulis pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Rumusan Strategi Umum

No.	Komponen Sistem Pendidikan	Kode	Strategi Umum
1	2	3	4
1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	ST1.1	Pemberdayaan dosen berkompeten
		ST1.2	Penyediaan manajemen prodi berkompeten
2	Pembelajaran dan Penilaian	ST2.1	Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
		ST2.2	Penyediaan data dan informasi serta akreditasi yang handal.
3	Sarana dan Prasarana	ST3.1	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas.
4	Pembiayaan	ST4.1	Penguatan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan.
		ST4.2	Penguatan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran.

5	Tata Kelola	ST5.1	Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis.
		ST5.2	Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset milik negara di lingkungan PPs.
		ST5.3	Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal PPs.

B. Arah Kebijakan Pengembangan PPs

Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pengembangan PPs periode lima tahun yang akan datang. Keterkaitan strategi umum dan arah kebijakan disajikan dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5 keterkaitan Strategi dengan Arah Kebijakan

Kode	Strategi Umum	Arah Kebijakan
1	2	3
ST1.1	Pemberdayaan dosen berkompeten	a. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi dosen.
ST1.2	Penyediaan manajemen prodi berkompeten	b. Pemberdayaan pimpinan prodi.
ST2.1	Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).	c. Penerapan metodologi pembelajaran akhlak mulia dan karakter bangsa. d. Pengembangan metodologi pembelajaran yang berjiwa kreatif, inovatif, dan wirausaha.
ST2.2	Penyediaan data dan informasi serta akreditasi yang handal.	d. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan
ST3.1	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas.	e. Penguatan pendayagunaan TIK di bidang pendidikan f. Penyediaan buku ajar.
ST4.1	Penguatan subsidi untuk meningkatkan layanan pendidikan.	g. Fasilitasi pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. h. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.
ST5.1	Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis.	i. Reformasi birokrasi di lingkungan PPs j. Koordinasi antar unit kerja di lingkungan UNIMA.
ST5.2	Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset milik negara di lingkungan PPs.	

ST5.3	Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal PPs.	
-------	---------------------------------------------------------	--

C. Kerangka Regulasi

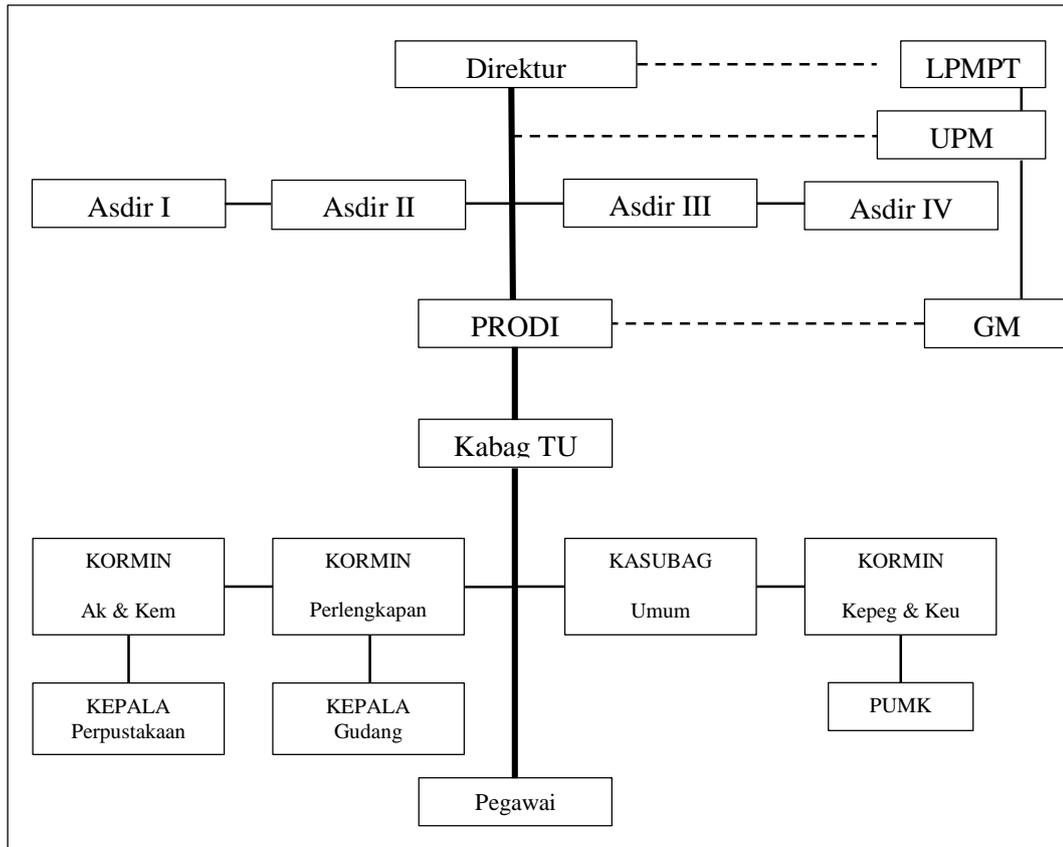
Regulasi untuk pengembangan PPs sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, PPs akan merumuskan dan menetapkan regulasi-regulasi sebagai berikut.

1. Rancangan Keputusan Rektor tentang Rencana Strategis PPs.
2. Rancangan Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman akademik PPs.
3. Rancangan Keputusan Rektor tentang Kurikulum PPs.
4. Rancangan Keputusan Rektor tentang SOP PPs.
5. Rancangan Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
6. Rancangan Keputusan Rektor tentang Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi.
7. Rancangan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa PPs.
8. Rancangan Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Plagiarisme.
9. Rancangan Keputusan Direktur:
 - Rancangan Keputusan Direktur tentang Tim Penjaminan Mutu Internal PPs.
 - Rancangan Keputusan Direktur tentang Tim Penjaminan Mutu Internal Program Studi.
 - Rancangan Keputusan Direktur tentang Tim Pengembang Kurikulum Program Studi.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan PPs yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan dalam struktur organisasi PPs sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI PPS



Gambar 1 Struktur Organisasi PPs

Keterangan:

————— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROGRAM PASCASARANA

A. Program Pengembangan PPs

Pengembangan PPs disusun dalam beberapa program yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai tahun 2020. Program-program tersebut disusun berdasarkan jenjang program pendidikan magister (S2) dan program pendidikan doktor (S3) serta dukungan manajemen yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program yang dikelompokkan sebagai tersebut.

Kode	Program (P)
P1	Program Pendidikan Magister
P2	Program Pendidikan Doktor
P3	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya PPs

B. Program dan Kegiatan Pengembangan PPs

1. Program dan Kegiatan Pendidikan Magister

Program pendidikan magister (S2) dilakukan untuk mendukung tujuan (T2) yakni tersedia, berkualitas, dan terjaminnya layanan pendidikan pada program magister yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam melaksanakan program pendidikan magister (2) ini digunakan strategi sebagai berikut.

1. Penyediaan dosen program magister (S2) berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, berkesetaraan, dan berdaya saing (ST1.1).
2. Peningkatan kualitas pengelolaan PPs untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel (ST1.2).
3. Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (ST2.1).
4. Penyediaan data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan tinggi (ST2.2).
5. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran yang berkualitas dan berdaya saing (ST3.1).

6. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran berbasis IT yang berkualitas (ST4.2).

Keberhasilan dari program ini diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) seperti yang disajikan dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Program Pendidikan Magister

No.	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
IKP1.1	Angka rata-rata IPK	3,42	3,42	3,42	3,45	3,45	3,5
IKP1.2	Persentase lulusan	20%	25%	30%	40%	50%	70%
IKP1.3	Persentase lulusan yang langsung bekerja	50%	55%	60%	65%	70%	75%
IKP1.4	Mahasiswa <i>dropout</i>	-	-	0,02	0,01	0,01%	0,01%
IKP1.5	Persentase Dosen berkualifikasi S3	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKP1.6	Persentase Dosen bersertifikat profesi	90%	91%	92%	93%	94%	95%
IKP1.7	Persentase Dosen dengan jabatan lektor kepala	46%	47%	48%	49%	50%	85
IKP1.8	Persentase Dosen dengan jabatan profesor	16%	18%	19%	21%	23%	25
IKP1.9	Jumlah publikasi nasional	-	1	2	4	4	5
IKP1.10	Jumlah publikasi internasional	-	2	4	5	6	7
IKP1.11	Jumlah HKI yang didaftarkan	-	3	5	7	8	10
IKP1.12	Jumlah prodi terakreditasi minimal B	-	-	-	8	11	10
IKP1.13	Jumla buku ajar	-	-	4	5	6	7
IKP1.14	Jumlah monitoring dan evaluasi perkuliahan oleh PPs	-	-	-	2	2	2
IKP1.15.	Persentase kurikulum prodi sesuai KKNI	-	-	50%	100%	100%	100%

IKP1.16	Persentase perangkat RPS	-	-	50%	100%	100%	100%
IKP1.17	Jumlah monitoring dan evaluasi perkuliahan oleh Prodi	-	-	-	4	4	4
IKP1.18	Jumlah dosen yang mengikuti seminar nasional dan internasional	Nd*)	Nd	Nd	10	10	14

ND*) : Nondeterminasi

Pencapaian target program pendidikan magister dicapai melalui kegiatan yang diukur dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut.

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Kegiatan Program Pendidikan Magister

No.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan 1:							
Penyediaan Layanan Akademik Program Studi							
IKK1.1	Angka rata-rata IPK	3,42	3,42	3,42	3,45	3,45	3,5
IKK1.2	Persentase lulusan	20%	25%	30%	40%	50%	70%
IKK1.3	Persentase lulusan yang langsung bekerja	50%	55%	60%	65%	70%	75%
IKK1.4	Mahasiswa <i>dropout</i>	-	-	0,02	0,01	0,01%	0,01%
IKK1.5	Jumlah prodi terakreditasi	3	3	3	8	11	10
IKK1.6	Jumlah prodi terakreditasi minimal B	-	-	-	8	11	10
IKK1.7	Jumlah buku ajar	-	-	4	5	6	7
IKK1.8	Persentase kurikulum prodi S2 sesuai KKNI	-	-	50%	100%	100%	100%
IKK1.9	Persentase perangkat RPS	-	-	50%	100%	100%	100%
IKK1.10	Jumlah prodi baru	-	-	-	-	1	1
IKK1.12	Jumlah monitoring dan evaluasi perkuliahan oleh Prodi	-	-	-	4	4	4

IKK1.13	Jumlah monitoring dan evaluasi perkuliahan oleh PPs	-	-	-	2	2	2
IKK1.14	Jumlah dosen yang mengikuti seminar nasional dan internasional	Nd*)	Nd	Nd	10	10	14
Kegiatan 2: Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu							
IKK2.1	Persentase Dosen berkualifikasi S3	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKK2.2	Persentase Dosen bersertifikat profesi	90%	91%	92%	93%	94%	95%
IKK2.3	Persentase Dosen dengan jabatan lektor kepala	46%	47%	48%	49%	50%	85%
IKK2.4	Persentase Dosen dengan jabatan profesor	16%	18%	19%	21%	23%	25%
Kegiatan 3: Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat							
IKK3.1	Jumlah hasil penelitian	-	-	25	40	50	78
IKK3.2	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat	-	-	25	40	50	78
IKK3.3	Jumlah publikasi nasional	-	1	2	4	4	5
IKK3.4	Jumlah publikasi internasional	-	2	4	5	6	7
IKK3.5	Jumlah HKI yang didaftarkan	-	3	5	7	8	10

Nd*) : Nondeterminasi

C. Program Pendidikan Doktor

Program pendidikan doktor (S3) dilakukan untuk mendukung tujuan (T2) yakni tersedia, berkualitas, dan terjaminnya layanan pendidikan pada program doktor yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam melaksanakan program pendidikan doktor (S3) ini digunakan strategi sebagai berikut.

1. Penyediaan dosen program magister (S2) berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, berkesetaraan, dan berdaya saing (ST1.1).
2. Peningkatan kualitas pengelolaan PPs untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel (ST1.2).
3. Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (ST2.1).
4. Penyediaan data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan tinggi (ST2.2).
5. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran yang berkualitas dan berdaya saing yang merata di seluruh prodi (ST3.1).
6. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran berbasis IT yang berkualitas dan setara di seluruh prodi (ST4.2).

Keberhasilan dari program ini diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) seperti yang disajikan dalam tabel 6.2.

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Program Pendidikan Doktor

No.	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020
IKP2.1	Angka rata-rata IPK	3.05	3,25	3,35	3,5	3,55	3,6
IKP2.2	Persentase lulusan	45%	50%	60%	65%	70%	75%
IKP2.3	Persentase lulusan yang langsung bekerja	60%	68%	73%	75%	77%	80%
IKP2.4	Mahasiswa <i>dropout</i>	-	-	0,02	0,01	0,01%	0,01%
IKP2.5	Persentase Dosen berkualifikasi S3	90%	100%	100%	100%	100%	100%
IKP2.6	Persentase Dosen bersertifikat profesi	50%	50%	50%	83%	100%	100%
IKP2.7	Persentase Dosen dengan jabatan lektor kepala	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKP2.7	Persentase Dosen dengan jabatan profesor	50%	50%	83%	83%	83%	75%
IKP2.9	Jumlah publikasi	-	1	3	4	4	5

	nasional						
IKP2.10	Jumlah publikasi internasional	-	1	2	3	4	5
IKP2.11	Jumlah HKI yang didaftarkan	-	-	3	3	4	5
IKP2.12	Akreditasi prodi minimal B	-	-	-	C	C	B
IKP2.13	Jumlah buku ajar	1	2	2	3	3	3
IKP2.14	Jumlah monitoring dan evaluasi perkuliahan oleh PPs	-	-	-	2	2	2
IKP2.15	Jumlah monitoring dan evaluasi perkuliahan oleh Prodi	-	-	-	4	4	4
IKP2.16	Persentase kurikulum prodi sesuai KKNI	-	-	50%	100%	100%	100%
IKP2.17	Persentase perangkat RPS	-	-	50%	100%	100%	100%
IKP2.18	Jumlah dosen mengikuti seminar nasional dan internasional	Nd*)	Nd	Nd	10	10	14

ND*) : Nondeterminasi

Pencapaian target program pendidikan doktor dicapai melalui kegiatan yang diukur dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut.

Tabel 6.4 Indikator Kinerja Kegiatan Program Pendidikan Doktor

No.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan 1:							
Penyediaan Layanan Akademik Program Studi							
IKK1.1	Angka rata-rata IPK	3.05	3,25	3,35	3,5	3,55	3,6
IKK1.2	Persentase lulusan	45%	50%	60%	65%	70%	75%
IKK1.3	Persentase lulusan yang langsung bekerja	60%	68%	73%	75%	77%	80%
IKK1.4	Mahasiswa <i>dropout</i>	-	-	0,02	0,01	0,01%	0,01%
IKK1.5	Akreditasi prodi minimal B	-	-	-	C	C	B

IKK1.6	Jumlah buku ajar	1	2	2	3	3	3
IKK1.7	Persentase kurikulum prodi sesuai KKNI	-	-	50%	100%	100%	100%
IKK1.8	Persentase perangkat RPS	-	-	50%	100%	100%	100%
IKK1.9	Jumlah monitoring dan evaluasi perkuliahan oleh PPs	-	-	-	2	2	2
	Jumlah monitoring dan evaluasi perkuliahan oleh Prodi	-	-	-	4	4	4
IKP1.10	Jumlah dosen mengikuti seminar nasional dan internasional	Nd ^{*)}	Nd	Nd	10	10	14
Kegiatan 2: Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu							
IKK2.1	Persentase Dosen berkualifikasi S3	90%	100%	100%	100%	100%	100%
IKK2.2	Persentase Dosen bersertifikat profesi	50%	50%	50%	83%	100%	100%
IKK2.3	Persentase Dosen dengan jabatan lektor kepala	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKK2.4	Persentase Dosen dengan jabatan profesor	50%	50%	83%	83%	83%	75%
Kegiatan 3: Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat							
IKK3.1	Jumlah publikasi nasional	-	1	3	4	4	5
IKK3.2	Jumlah publikasi internasional	-	1	2	3	4	5
IKK3.3	Jumlah HKI yang didaftarkan	-	-	3	3	4	5
IKK3.4	Jumlah hasil penelitian Dosen	6	6	6	6	6	6
IKK3.5	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen	6	6	6	6	6	6

*) Nd : Nondeterminasi

D. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya PPs

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya PPs dilakukan untuk mendukung tujuan (T3) yakni tersedia, berkualitas, dan terjaminnya sistem tata kelola pendidikan yang menopang terwujudnya layanan prima pendidikan.

Dalam melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya PPs ini digunakan strategi sebagai berikut.

- a. Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis (ST5.1).
- b. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset milik negara (ST5.1).
- c. Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal PPs (ST5.3).

Keberhasilan dari program ini diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) seperti yang disajikan dalam tabel 6.5.

Tabel 6.5 Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPs

No.	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020
IKP3.1	Persentase realisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKP3.2	Persentase pelaporan penggunaan anggaran setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKP3.3	Persentase SOP kegiatan dan implementasinya	-	50%	65%	75%	100%	100%
IKP3.4	Persentase prodi terkoneksi ke SIA	-	100%	100%	100%	100%	100%
IKP3.5	Persentase pengisian nilai matakuliah oleh dosen terkoneksi ke SIA	-	100%	100%	100%	100%	100%
IKP3.6	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	-	1	1	1	1	2

Pencapaian target program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PPs melalui kegiatan yang diukur dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut.

Tabel 6.6 Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPs

No.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Kegiatan 1:							
Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan dan Kerjasama PPs							
IKK1.1	Persentase ketersediaan Renstra PPs	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKK1.2	Persentase ketersediaan Renop PPs	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKK1.3	Persentase laporan kinerja yang disampaikan Direktur ke Rektor	-	-	-	100%	100%	100%
IKK1.4	Persentase ketersediaan Renstra prodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKK1.5	Persentase ketersediaan Renop prodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKK1.6	Persentase laporan pelaksanaan bidang akademik per semester prodi	-	-	-	100%	100%	100%
IKK1.7	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	-	1	1	1	1	2
Kegiatan 2:							
Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum PPs							
IKK2.1	Persentase ketersediaan ruangan kuliah	50%	50%	50%	75%	100%	100%
IKK2.2	Persentase peningkatan kinerja kearsipan dan persuratan di lingkungan PPs	60	65	70	75	80	85
IKK2.3	Persentase peningkatan kinerja pengecekan	-	-	-	75%	85	90

	perlengkapan di lingkungan PPs						
IKK2.4	Jumlah sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru	1	1	1	1	1	1
IKK2.5	Persentase Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah	25%	50%	50%	100%	100%	100%
IKK2.6	Persentase Buku Pedoman Akademik	25%	50%	50%	100%	100%	100%
IKK2.7	Persentase SOP kegiatan dan implementasinya	50%	50%	50%	100%	100%	100%
IKK2.8	Jumlah jurnal nasional (ISSN)	5	5	8	10	11	14
IKK2.9	Persentase penataan fasilitas ruang kerja dosen	-	-	-	25	35	50%
IKK2.10	Persentase ketersediaan fasilitas TIK (internet)	-	-	-	50	70	75%
IKK2.11	Persentase ketersediaan laboratorium komputer	-	-	-	50	60	75%
Kegiatan 3:							
Peningkatan Layanan Prima dalam Bidang Pengelolaan Anggaran							
IKK3.1	Persentase realisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKK3.2	Persentase pelaporan penggunaan anggaran setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan 4:							
Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian							
IKK4.1	Persentase absensi pegawai	80%	90%	90%	95%	100%	100%
IKK4.2	Persentase kesesuaian kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan tugas dan jabatan	50%	50%	75%	100%	100%	100%

IKK4.2	Jumlah tenaga kependidikan mengikuti diklat	-	-	-	1	2	3
Kegiatan 5: Pengembangan TIK untuk Pendayagunaan E-Pembelajaran dan E-Administrasi							
IKK5.1	Persentase prodi terkoneksi ke SIA	-	100%	100%	100%	100%	100%
IKK5.2	Persentase pengisian nilai matakuliah oleh dosen terkoneksi ke SIA	-	100%	100%	100%	100%	100%
IKK5.3	Persentase prodi terkoneksi ke SIA	-	100%	100%	100%	100%	100%
IKK5.4	Jumlah e-jurnal nasional (terkreditasi)	-	-	-	-	1	1
IKK5.5	Jumlah jurnal internasional dan atau bilingual	-	-	-	-	-	1

BAB VII

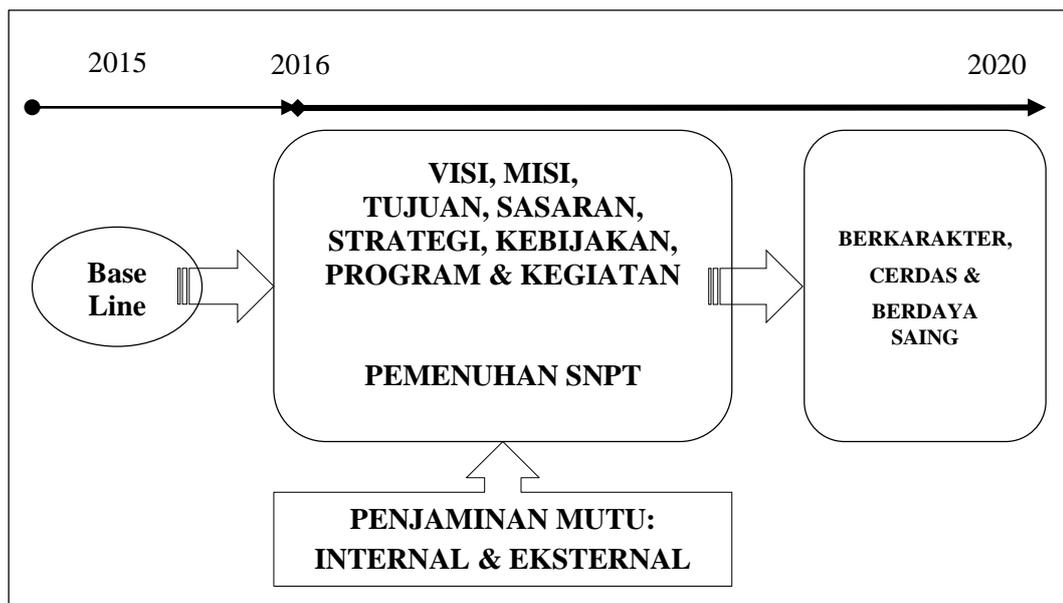
KERANGKA IMPLEMENTASI DAN PENDANAAN

A. Strategi Implementasi

Strategi implementasi Renstra PPs 2016--2020 dapat dikaji dari 4 (empat) hal yakni *road map* pengembangan PPs, pengembangan berbasis tri dharma perguruan tinggi, pengembangan berbasis TIK, pengembangan kemitraan, dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi.

1. *Road map* pengembangan PPs

Pengembangan PPs lima tahun ke depan diselaraskan dengan *road map* pengembangan UNIMA. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 7.1, revisi Renstra PPs memiliki peran untuk membawa PPs yang menopang tercapainya visi UNIMA lima tahun ke depan yakni mewujudkan universitas yang berkarakter, inovatif, unggul, dan kompetitif.



Gambar 7.1 *Road Map* Pengembangan PPs

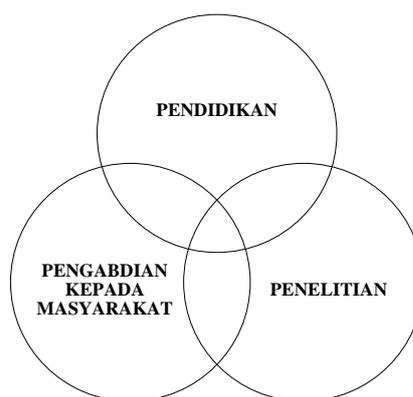
Untuk menghasilkan SDM yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing dibutuhkan layanan prima pendidikan yang ditunjukkan melalui ketersediaan, kualitas, relevansi, dan keterjaminan layanan pendidikan. Tentang layanan prima pendidikan dirumuskan tujuan strategis dan sasaran strategis yang terukur. Untuk

mencapai nya diperlukan strategi dan kebijakan agar program dan kegiatan yang dirumuskan dapat diukur dan dinilai melalui indikator kinerja utama.

Perwujudan indikator kinerja utama dari setiap program pada dasarnya menggambarkan pemenuhan SNPT sebagai standar minimal mutu PPs. Untuk memenuhi SNP tersebut dibutuhkan usaha-usaha penjaminan mutu, baik secara internal maupun secara eksternal. Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Internal (TPMI) di PPs dan di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (LPMPT) UNIMA. Sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Badan Standar Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Apabila semua usaha pengembangan PPs yang difokuskan pada tematik layanan prima pendidikan tersebut dapat diwujudkan, maka pada gilirannya akan bermuara pada menghasilkan SDM yang cerdas, berkarakter, dan berdaya asaing.

2. Strategi Pengembangan Berbasis Tridharma

Upaya pengembangan PPs diharapkan berbasis pada tridharma perguruan tinggi. Meskipun secara program dan kegiatan dari ketiga dharma yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbeda, tetapi ketiga hal itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ketiga dharma tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam arti adanya sinergitas dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya seperti terlihat dalam gambar 7.2.



Gambar 7.2 Tridharma Perguruan Tinggi

Pada satu sisi, pendidikan akademik yang dilaksanakan melalui suatu proses pembelajaran pada dasarnya bermuatan pengetahuan teoretik dan empiris yang diperoleh melalui suatu kegiatan pembelajaran yang berbentuk penelitian dan

pengembangan. Pengetahuan teoretik dan empiris yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan dapat diterapkan melalui proses pembelajaran dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pengetahuan teoretik dan empiris yang diperoleh melalui penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pada sisi yang lain, akumulasi pengetahuan berbasis tridharma tersebut dapat ditransferkan atau didayagunakan untuk memecahkan masalah masyarakat, sehingga PPs terhindari dari kritikan masyarakat yang mana perguruan tinggi sebagai menara gading.

Pengembangan PPs berbasis tridharma memungkinkan terlaksana dengan adanya fasilitasi, baik dari pemerintah pusat, UNIMA maupun masyarakat. Fasilitasi untuk dharma pendidikan dapat dirujuk pada kesempatan merebut hibah mengajar dan menulis buku ajar bagi dosen. Khusus hibah mengajar sangat penting diperjuangkan karena sangat bermanfaat bagi dosen dalam menyusun perangkat pembelajaran dan penggunaannya dalam proses pembelajaran.

Fasilitasi untuk dharma penelitian, selain melalui kelembagaan LPPM UNIMA, dapat juga melalui DRPM Kemristekdikti. Khusus melalui DRPM disediakan skema-skema penelitian yang bersifat kompetitif. Skema kompetitif nasional terbagi atas penelitian dasar yang mencakup Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) dan Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK); penelitian terapan yang meliputi Penelitian Strategis Nasional (PSN), Penelitian Penciptan dan Penyajian Seni (P3S), dan Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSN); penelitian peningkatan kapasitas yang mencakup Penelitian Dosen Pemula (PDP), Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT), Penelitian Tim Pascasarjana (PTP), Penelitian Disertasi Doktor (PDD), Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), dan Penelitian Pascadoktor (PPD); dan skema desentralisasi mencakup Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT), Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT), dan Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT).

Fasilitasi untuk dharma pengabdian kepada masyarakat selain melalui kelembagaan LPPM UNIMA, dapat juga melalui DRPM Kemristekdikti. Khusus

melalui DRPM disediakan skema-skema yang meliputi Program Kemitraan Masyarakat (PKM); Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK); Program Pengembangan Produk Ekspor (PPPPE); Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD); Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK); Program Kemitraan Wilayah (PKW); Program Kemitraan Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR; Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM); Program Hi-Link; dan Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM).

Apabila pengembangan PPs berbasis tridharma dapat dilaksanakan dengan baik, maka pada gilirannya akan memberi kontribusi terhadap pencapaian target-target kinerja dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Strategi Pengembangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menjadikan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai basis strategi pengembangan PPs adalah suatu keniscayaan. Pendayagunaan TIK sebagai basis pengembangan PPs sangat tergantung pada fasilitasi jaringan internet yang terpasang di PPs. Melalui ketersediaan internet tersebut dapat memungkinkan PPs mengembangkan program e-pembelajaran dan e-administrasi yang dapat mendukung keterlaksanaan tugas pokok dan fungsi PPs.

Pengembangan TIK di PPs dapat dilaksanakan secara desentralisasi di mana pihak PPs dapat mengelolanya secara otonom atau mandiri. Pengembangan ini dapat dilaksanakan bila ditunjang melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur TIK dari pihak rektorat UNIMA. Kalaupun belum memungkinkan secara desentralisasi, dapat juga secara sentralisasi di mana pihak rektorat UNIMA melalui Pusat Komputer (Puskom) UNIMA menyediakan akses yang memadai, sehingga kegiatan yang terkait langsung dengan pembelajaran dan administrasi akademik/nonakademik dapat berjalan lebih efisien, efektif, produktif, dan terkendali melalui fasilitasi TIK.

Pengembangan TIK di PPs sekarang ini telah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini penting menjadi perhatian karena keberhasilan PPs dalam mengembangkan diri dan pencitraan publik pada dasarnya juga merupakan bagian dari pengembangan diri dan pencitraan publik bagi UNIMA secara kelembagaan.

Oleh sebab itu, melalui pengembangan PPs berbasis TIK sangat menunjang dalam pencapaian target-target kinerja PPs ke depan, terutama yang terkait langsung dengan pengembangan e-pembelajaran dan e-administrasi.

4. Strategi Pengembangan Berbasis Kemitraan

Penciptaan layanan prima pendidikan di PPs, selain dikotribusi melalui pengembangan berbasis tridharma dan berbasis TIK, juga dapat dikotribusi melalui pengembangan PPs berbasis kemitraan. PPs harus berinisiatif merebut peluang-peluang kerjasama yang tersedia di tengah masyarakat seperti dengan sekolah-sekolah, instansi pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota), perguruan tinggi negeri dan swasta, baik yang di dalam Negeri maupun di luar Negeri, dunia usaha, dunia industri, organisasi keagamaan, lembaga sosial masyarakat, baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri, media sosial (rasio dan televisi), dan masyarakat luas. Kerjasama itu bukan hanya terbatas kepada pemerintah, melainkan diperluas kepada PPs-PPs di perguruan tinggi lain dan kepada dunia usaha dan dunia industri. Untuk itu penciptaan hubungan kemitraan perlu digalakkan dan digelorakan secara terus menerus sambil melihat peluang yang saling menguntungkan antar institusi.

Membangun hubungan kemitraan adalah suatu keharusan bagi PPs untuk mengembangkan diri secara kelembagaan. Kerjasama dan kolaborasi perlu diupayakan melalui berbagai jejaring yang tersedia di tengah masyarakat. Bukan tindak mungkin dalam kondisi tertentu tersedia peluang melakukan penelitian secara kolaboratif antar dosen dengan perguruan tinggi lain dan atau dengan institusi lain yang bergerak di bidang usaha dan industri. PPs memiliki potensi SDM dosen dengan latar belakang kompetensi yang bukan hanya di bidang pendidikan, melainkan juga di bidang nonkependidikan. Potensi-potensi dosen itu harus diberdayakan karena hal itu merupakan modal manusia yang dimiliki PPs.

Di samping itu, selama ini belum dilihat mahasiswa PPs sebagai potensi yang dapat membantu memediasi mengembangkan jejaring kerjasama dan kolaborasi yang lebih luas di tengah masyarakat. Para mahasiswa dapat diberdayakan sebagai agen penghubung, baik secara individu maupun secara organisasi, untuk meluaskan jaringan kemitraan yang telah ada, sehingga kerjasama yang cenderung hanya terbatas pada narasumber seminar dan pelaku

penelitian dapat diperluas dalam hal kerjasama pendidikan dan pelatihan di berbagai instansi yang mahasiswa ketahui. Hal ini sangat dimungkinkan dilakukan ke depan karena dosen-dosen PPs memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjadi pelaku pendidikan dan pelatihan, baik sebagai pencang, pelaksana maupun evaluatornya. Apabila hubungan kemitraan yang diciptakan sangat luas, maka akan memungkinkan tercapainya target-target kinerja PPs ke depan.

5. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Upaya mewujudkan layanan prima pendidikan membutuhkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) di PPs. Sistem monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui program dan/atau kegiatan secara berkala.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi perlu diletakkan pada prinsip-prinsip, yaitu: (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi; (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi agar hasilnya sah dan andal; (4) pelaksanaan dilakukan secara transparan, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara;; (6) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran monitoring dan evaluasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja; dan (11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target monitoring dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Monitoring dan evaluasi Renstra PPs bukan hanya dilakukan oleh pimpinan universitas dan PPs semata, tetapi dapat pula melibatkan para pimpinan

program studi. Monitorong dan evaluasi dapat dilakukan secara triwula, semesteran, dan tahunan. Monitorong dan evaluasi oleh universitas digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja UNIMA yang disusun sebagai target kinerja PPs, memperbaiki kinerja aparatur dan atau pimpinan universitas, dan meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur universitas dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan PPs digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja PPs, memperbaiki kinerja pimpinan PPs sesuai tupoksi masing-masing, dan meningkatkan kemampuan pimpinan PPs dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kelembagaan PPs. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan prodi digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja prodi yang disusun sesuai dengan target kinerja PPs, memperbaiki kinerja pimpinan prodi, dan meningkatkan kemampuan pimpinan PPs dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kelembagaan prodi.

B. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan, setiap tahunnya PPs mendapatkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Rupiah Murni (RM) dari pemerintah pusat dan yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari UNIMA.

Secara umum pendanaan yang dimaksud terdiri dari dua fungsi anggaran yaitu fungsi pendidikan dan fungsi layanan umum. Total anggaran tahun 2016-2020 yang dibutuhkan PPs adalah **sebesar ... milyar** rupiah untuk Program-Program Teknis dan Dukungan Manajemen. Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam tabel 7.1 pada lampiran 1.

Selain dari APBN dan PNBP, PPs akan berupaya agar pihak masyarakat luas dunia usaha dan dunia industri (Dudi) dan masyarakat luas dapat memberikan dukungan pendanaan untuk pengembangan PPs, baik bersumber dari alumni, orang tua mahasiswa, dunia usaha dan industri maupun masyarakat luas yang peduli pembangunan PPs.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) PPs tahun 2016-2020 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) PPs, sehingga akan lebih terarah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Kegiatan dengan output yang mendukung prioritas kelembagaan UNIMA tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPs. Namun, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pengembangan PPs juga dihasilkan berkat adanya dukungan pihak terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh *stakeholders*. Kerja keras dari seluruh jajaran PPs dan sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra PPs.

Tondano, Januari 2018

Direktur,



Prof. Dr. Treesje K. Londa, M.Si

NIP. 196307021987102001

Pelaksana Tugas

Lampiran 1: Kerangka Pendanaan

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PASCASARJAN (PPs) TAHUN 2016--2020

Kerangka pendanaan PPs tahun 2016--2020 direkapitulasi berdasarkan kebutuhan anggaran seperti tertuang dalam tabel 7.1 pada lampiran 1 berikut ini.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2016--2020

No.	Program/kegiatan	Anggaran					Total
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Program Pendidikan Magister						
1.1	Penyediaan Layanan Akademik Program Studi						
1.2	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu						
1.3	Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat						
2	Program Pendidikan Doktor						
2.1	Penyediaan Layanan Akademik Program Studi						
2.2	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu						
2.3	Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat						

3	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya						
3.1	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan dan Kerjasama PPs						
3.2	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum PPs						
3.3	Peningkatan Layanan Prima dalam Bidang Pengelolaan Anggaran						
3.4	Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian						
3.5	Pengembangan TIK untuk Pendayagunaan E-Pembelajaran dan E-Administrasi						